

DASAWARSA **2006**
PEKERJAAN LAYAK
ASIA **2015**



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2008

Kemajuan dan jalan menuju pembangunan padat karya



Kantor ILO Jakarta dan Timor Leste

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2008:

Kemajuan dan jalan menuju pembangunan padat karya

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui e-mail: pubdroit@ilo.org. Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN 978-92-2-021508-1 (buku)

ISBN 978-92-2-021509-8 (web pdf)

ILO

Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2008: Kemajuan dan jalan menuju pembangunan padat karya / Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2008

vi, 48 hal

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: Labour and social trends in Indonesia 2008: Progress and pathways to job-rich development / International Labour Office – Jakarta: ILO, 2008

vi, 47 hal.

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland (e-mail: pubvente@ilo.org) ; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia (e-mail: jakarta@ilo.org). Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas atau melalui email.

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Dicetak di Indonesia

Kata Pengantar

Pada Pertemuan Wilayah Asia Ke 14 ILO, yang diadakan di Busan, Republik Korea pada Agustus 2006, perwakilan dari pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja dari Indonesia dan negara-negara lain di Asia berkomitmen untuk mencapai *Dasawarsa Pekerjaan yang Layak Asia* (Asian Decent Work Decade) 2006-2015. Selama periode ini upaya-upaya bersama dan berkelanjutan akan dilaksanakan untuk mewujudkan pekerjaan yang layak di wilayah Asia Pasifik. Laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial ini bertujuan untuk memaparkan kecenderungan-kecenderungan sosioekonomi dan pasar kerja di perekonomian terbesar Asia Tenggara dengan tujuan untuk menyikapi tantangan-tantangan kebijakan kunci yang ada dalam tren saat ini selama Dasawarsa Pekerjaan yang Layak.

Secara khusus laporan ini bermaksud untuk memberikan informasi bagi pembuatan dan pengembangan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (2010-2014) Indonesia dan peta jalan untuk pencapaian *Tujuan Pembangunan Milenium* (MDG). Baru-baru ini, pekerjaan yang layak telah ditambahkan sebagai target baru MDG di bawah pengentasan kemiskinan ekstrim, dan laporan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran mengenai sasaran baru ini dan indikator-indikator yang terkait.

Kantor ILO di Jakarta seringkali mendapatkan pertanyaan mengenai informasi, data, analisis dan pengetahuan praktis mengenai situasi ketenagakerjaan di Indonesia dari para konstituen, donor, peneliti, organisasi masyarakat dan pihak-pihak lain yang memiliki ketertarikan akan masalah tersebut. Laporan ini bertujuan untuk memberikan sebagian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Laporan pun bertujuan membangun kapasitas para mitra nasional untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai pasar kerja agar dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dan merancang kebijakan yang sesuai.

Laporan ini disusun oleh Kee Beom Kim, Ekonom Kantor ILO di Jakarta. Laporan ini juga mendapatkan dukungan teknis dan komentar berharga dari rekan-rekan ILO Jakarta; Gyorgy Sziraczki dan Steve Kapsos dari Unit Analisis Sosial dan Ekonomi Regional – Kantor Regional Asia dan Pasifik ILO; dan Lawrence Jeff Johnson dan Theo Sparreboom dari Tim Tren Ketenagakerjaan – Kantor Pusat ILO di Jenewa. Bab 2 dari laporan ini sebagian diambil dari dokumen latar belakang yang disusun Suahasil Nazara dari Lembaga Demografis – Universitas Indonesia.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi dalam debat kebijakan yang membangun dan praktik-praktik yang lebih baik dalam upaya mewujudkan pekerjaan yang layak di Indonesia.

Alan Boulton
Direktur
Kantor ILO di Jakarta

Daftar Akronim dan Istilah

ADB	<i>Asian Development Bank</i> –Bank Pembangunan Asia
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations – Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
EAST	<i>Education and Skills Training for Youth Employment</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ITUC	<i>International Trade Union Congress</i>
ICLS	<i>International Conference of Labour Statisticians</i>
Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kcal	Kilo kalori
MDG	<i>Millennium Development Goal</i> – Tujaun Pembangunan Milenium
NRR	<i>Net Reproductive Rate</i> – Angka Reproduksi Netto
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OPEC	<i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i>
PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Akronim dan Istilah	iv
Tinjauan	1
1. Kecenderungan di pasar kerja	5
1.1 Kecenderungan perekonomian	5
1.2 Kecenderungan pasar kerja	8
1.3 Kecenderungan dan implikasi kebijakan	19
2. Melihat ke depan ke 2015	23
2.1 Proyeksi kecenderungan demografis	23
2.2 Proyeksi dan skenario kecenderungan pasar kerja	26
2.3 Kecenderungan sosial dan implikasi masa mendatang	30
2.4 Tanggapan kebijakan dalam Dasawarsa Pekerjaan Layak Asia	32
Lampiran I Disagregasi BPS mengenai Ketenagakerjaan di Perekonomian Formal dan Informal	35
Lampiran II Mendorong Usaha yang Berkelanjutan	36
Lampiran III Elastisitas Ketenagakerjaan di Indonesia	37
Lampiran IV Lembaran Statistik	38
Daftar Tabel	
1.1 Pertumbuhan PDB Tahunan, 2000–2007 (persentase)	5
1.2 Laju Pertumbuhan PDB komponen pengeluaran, 2001–2007 (persentase)	6
1.3 Distribusi ketenagakerjaan berdasarkan jenis kelamin, 2002–2007 (persentase)	12
1.4 Pekerja Miskin, 2002 dan 2006	16
1.5 Keluaran per pekerja pada tahun 2000 dan 2007	18
2.1 Proyeksi demografis, 2006–2015	24
2.2 Skor rata-rata PISA 2006	28
2.3 Skenario pasar kerja berdasarkan berbagai elastisitas ketenagakerjaan (juta)	29
Daftar Gambar	
1.1 Persentase PDB per sektor dengan harga konstan tahun 2000, 2000–2007	6
1.2 Pengangguran, 1996–2007 (persentase)	8
1.3 Pengangguran: Kaum muda dan berdasarkan jenis kelamin, 2004–2007 (persentase)	9
1.4 Rasio tenaga kerja- penduduk, 2002–2007 (persentase)	11
1.5 Distribusi status angkatan kerja, 2002 dan 2007	14
1.6 Pekerjaan rentan berdasarkan jenis kelamin, 2003–2007	15
1.7 Upah, 2000–2007	19

2.1 Rasio ketergantungan, 1950–2030	25
2.2 Populasi usia 10+ berdasarkan tingkat pendidikan	27
2.3 Kemiskinan di Indonesia: Masa lampau dan proyeksi	30

Daftar Kotak

1.1 Mengurangi dampak peningkatan bahan bakar terhadap penduduk miskin	7
1.2 Pekerjaan penuh, produktif dan layak: Target baru MDG	10
1.3 Program “3 in 1” untuk mendukung penciptaan lapangan kerja	11
1.4 Keterbatasan data yang diturunkan secara makro dalam perkiraan pekerja miskin	17
1.5 Pekerja anak di Indonesia	17
2.1 Tunjangan hari tua di Indonesia	26
2.2 Inisiatif pekerjaan ramah lingkungan (pekerjaan hijau)	31

Tinjauan

Perekonomian terbesar di Asia Tenggara telah menunjukkan peningkatan yang sehat sejak awal dasawarsa ini, mencatat pertumbuhan PDB 6,3 persen pada tahun 2007. Investasi di Indonesia juga meningkat secara signifikan setiap tahunnya, lebih cepat ketimbang pertumbuhan komponen-komponen lain dari PDB. Produksi manufaktur sebagai bagian dari PDB tetap stabil tetapi perluasan besar-besaran terjadi di sektor jasa. Sebagai bagian dari PDB, sektor ini tumbuh dari 38,5 persen pada 2000 menjadi 43,7 persen pada 2007.

Kinerja ekonomi yang ajeg

Namun, pertumbuhan ekonomi yang ajeg ini tidak serta-merta menghasilkan pasar kerja yang lebih baik. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran, dengan menggunakan definisi standar internasional, yang tidak mengikutsertakan mereka yang tidak termotivasi mencari kerja (*discouraged workers*) atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak lagi mengharapkan mendapat pekerjaan, meningkat 7,2 persen dari level tahun 2002. Jumlah *discouraged workers* telah menurun, kendati penurunan ini hampir tertutupi dengan peningkatan jumlah mereka yang mencari kerja. Lebih lanjut, setengah menganggur yang terjadi secara tidak sukarela telah meningkat, sementara perbandingan antara tenaga kerja dan penduduk, yang mengindikasikan berapa banyak penduduk yang berkontribusi dalam produksi barang dan jasa, menunjukkan sedikit perubahan dalam enam tahun terakhir dan tidak bergerak dari kisaran 60 persen.

Pengangguran dan setengah menganggur masih merupakan tantangan besar

Perbandingan tenaga kerja dan penduduk merupakan salah satu dari empat indikator baru yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) agar pekerjaan produktif dan layak untuk semua menjadi tujuan utama dari strategi pembangunan internasional dan nasional, di bawah tujuan pengentasan kemiskinan. Target baru ini mencerminkan meningkatnya keyakinan bahwa pekerjaan yang layak adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan yang berkelanjutan. Indikator-indikator baru MDG lainnya meliputi pekerjaan rentan (jumlah pekerja mandiri dan anggota keluarga yang berkontribusi sebagai persentase dari total pekerjaan), produktivitas tenaga kerja dan persentase orang miskin (US\$ 1 per hari) yang bekerja dari keseluruhan tenaga kerja.

Pekerjaan produktif dan layak untuk semua, sebuah target baru MDG

*Pekerjaan rentan
menurun sedikit
tetapi sebagian besar
dari pekerja masih
rentan*

Pekerjaan rentan, yang memberikan indikasi mengenai kualitas pekerjaan dan derajat informalisasi pasar kerja, menurun dari 64,7 persen pada 2003 menjadi 62,1 persen pada 2007, seiring dengan lebih cepatnya pertumbuhan sektor formal ketimbang sektor informal. Pekerjaan rentan sebagian besar masih terdapat di sektor pertanian, kendati perekonomian informal perkotaan berkembang dengan pesat.

*Pertumbuhan
produktivitas sehat
tetapi pendapatan
terbatas bagi pekerja*

Pertumbuhan produktivitas di Indonesia meningkat secara signifikan dalam tahun-tahun belakangan ini. Hal ini didorong oleh perpindahan lapangan kerja dari aktivitas bernilai tambah rendah ke aktivitas bernilai tambah lebih tinggi, dan khususnya disebabkan pertumbuhan produktivitas di sektor jasa. Namun, pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan upah riil.

*50 juta orang miskin
yang bekerja*

Kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi sebagian besar orang yang bekerja. Dengan menggunakan standar garis kemiskinan US\$2 per hari, diperkirakan bahwa setengah dari jumlah orang yang bekerja tergolong miskin. Kaum miskin sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, meski jumlah pekerja miskin di perkotaan meningkat. Dengan kenaikan harga bahan bakar dan makanan yang dramatis, pekerja miskin tampaknya akan mengalami penurunan standar hidup dan daya beli lebih lanjut lagi.

*Perempuan dan
kaum muda
menghadapi
tantangan yang
tidak adil dalam
pasar kerja*

Walaupun jumlah pekerjaan bagi perempuan dapat dikatakan meningkat, ketidaksetaraan gender masih terlihat secara signifikan di dalam semua indikator terkait, termasuk gaji, di mana kesenjangan gender tetap berkisar 75% semenjak tahun 2001. Kaum muda juga menghadapi tantangan yang tidak adil dalam pasar kerja: kaum muda mewakili 21 persen dari angkatan kerja Indonesia, namun merupakan 57 persen dari angka pengangguran nasional.

*Peningkatan pesat
di sektor jasa dan
pekerja migran*

Sektor jasa telah memberikan sebagian besar pekerjaan bagi perempuan dan seperti itu dalam waktu dekat akan menjadi sektor dominan dalam ketenagakerjaan secara keseluruhan. Dalam sektor manufaktur, pola perdagangan mempengaruhi hasil pekerjaan. Pada saat yang bersamaan, jumlah pekerja migran di luar negeri meningkat cepat dan diharapkan untuk terus meningkat. Hal ini tercermin dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan migrasi ke luar negeri guna mengurangi tekanan pada lapangan kerja dalam negeri.

*Populasi yang
menua*

Melihat ke masa yang akan datang, populasi Indonesia diharapkan untuk meningkat sekitar 1,1 persen per tahun, menjadi 248 juta selama Dasawarsa Pekerjaan Layak, yang lebih rendah dari laju pertumbuhan 1,3 persen pada periode sebelumnya. Penurunan tingkat kelahiran pada saat ini memungkinkan Indonesia untuk menikmati penurunan rasio ketergantungan, tetapi rasio ini akan mulai meningkat lagi setelah tahun 2017. Pada saat yang bersamaan, populasi menua, dan hal ini akan membawa dampak buruk bagi sistem jaminan sosial Indonesia.

Angkatan kerja Indonesia diharapkan untuk meningkat sebesar 14 persen antara tahun 2006 dan 2015, dan mereka akan memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Perekonomian akan perlu bergeser ke jalur pertumbuhan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa penduduk yang lebih berpendidikan dan terampil ini memiliki akses ke pekerjaan layak dan produktif. Pada saat yang bersamaan terdapat keperluan untuk memastikan bahwa pekerja tidak hanya memiliki pendidikan lebih tinggi tetapi juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik. Hasil dari survei penilaian internasional menunjukkan bahwa pelajar Indonesia mungkin tidak mendapatkan kompetensi-kompetensi utama yang mereka perlukan dalam kehidupan dewasa mereka.

Angkatan kerja akan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi tetapi permasalahan utama adalah kualitas pendidikan dan pelatihan

Laju urbanisasi Indonesia yang cepat sepertinya akan terus berlanjut, hal ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan sektor jasa tetapi juga pertumbuhan perekonomian informal perkotaan. Tantangan utamanya adalah untuk menghasilkan pekerjaan yang layak di wilayah perkotaan dan juga investasi infrastruktur. Untuk menghindari ancaman kerusakan lingkungan serius yang terkait dengan urbanisasi yang cepat ini, Indonesia harus beralih ke perekonomian yang lebih hijau serta pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Hal ini pada gilirannya akan menghasilkan lebih banyak kesempatan untuk menciptakan pekerjaan hijau.

Laju urbanisasi yang cepat membutuhkan pekerjaan ramah lingkungan (pekerjaan hijau)

Bagi para pembuat kebijakan, kecenderungan ini mengindikasikan kebutuhan akan strategi ketenagakerjaan yang komprehensif dan terkoordinasi yang menempatkan pekerjaan layak dan produktif sebagai pusat dari kebijakan perekonomian dan sosial melalui peningkatan koordinasi antara berbagai kementerian. Strategi seperti ini akan membutuhkan identifikasi target yang sesuai, seperti fokus pada penciptaan pekerjaan dan bukan pengurangan pengangguran.

Dibutuhkan strategi ketenagakerjaan yang komprehensif

Pada saat yang bersamaan, juga diperlukan untuk: membangun kapasitas di sektor-sektor dengan pertumbuhan dinamis, seperti jasa, melalui strategi pengembangan keterampilan yang sesuai; mendorong lebih banyak lagi investasi padat karya; menciptakan lingkungan yang kondusif untuk usaha yang berkelanjutan, terutama usaha kecil dan menengah; dan membuat kebijakan dan lembaga pasar kerja guna memberikan bantuan bagi pekerja untuk menyesuaikan diri dengan transformasi struktural perekonomian. Dialog sosial akan menjadi penting di bidang-bidang kebijakan dan harus didukung dengan peningkatan kapasitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta organisasi pekerja dan pengusaha.

Dialog sosial sangat penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

Lebih lanjut, pembangunan yang diproyeksikan terjadi selama Dasawarsa Pekerjaan Layak Asia (2006-2015) memerlukan berbagai tanggapan kebijakan yang sesuai, termasuk:

- ♦ Penguatan sistem jaminan sosial, terutama untuk lanjut usia, dan memperluas jaminan sosial ke sektor informal;

- ♦ Memastikan keseimbangan antara pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan lapangan kerja untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, terutama dengan meningkatkan produktivitas perekonomian informal;
- ♦ Meningkatkan investasi dalam kualitas dan kuantitas pendidikan, dan terutama memastikan bahwa pendidikan memenuhi kebutuhan pasar kerja saat ini dan mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang;
- ♦ Memberikan perlindungan bagi pekerja migran yang terus meningkat jumlahnya; dan
- ♦ Memaksimalkan kesempatan yang ditawarkan oleh pekerjaan hijau melalui dialog sosial dan pendekatan tripartit.

Kecenderungan-kecenderungan di pasar kerja

1.1 Kecenderungan ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara, tumbuh dengan laju rata-rata 5,0 persen per tahun antara tahun 2000 dan 2007 (Tabel 1.1). Laju pertumbuhan ini kurang lebih sama dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya seperti Filipina dan Thailand, tetapi lebih rendah dari negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2007, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 6,3 persen, pertumbuhan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

*Kinerja
perekonomian yang
terus membaik*

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDB per tahun, 2000–2007 (persentase)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 ^p	Rata-rata 2000-07
Indonesia	4,9	3,6	4,5	4,8	5,0	5,7	5,5	6,3	6,0	5,0
Memorandum										
ASEAN	6,7	1,9	4,9	5,4	6,5	5,7	6,0	6,5	5,5	5,5
Malaysia	8,9	0,5	5,4	5,8	6,8	5,3	5,8	6,3	5,4	5,6
Filipina	6,0	1,8	4,4	4,9	6,4	5,0	5,4	7,2	5,5	5,1
Thailand	4,8	2,2	5,3	7,1	6,3	4,5	5,1	4,8	5,0	5,0
Singapura	10,1	-2,4	4,2	3,5	9,0	7,3	8,2	7,7	4,9	6,0
^p proyeksi										
Sumber: Bank Pembangunan Asia (ADB), <i>Asia Economic Monitor</i> 2007.										

Pada tahun 2007, investasi meningkat sebesar 9,2 persen, lebih cepat dari pertumbuhan komponen pengeluaran PDB lainnya sejak tahun 2000 (Tabel 1.2). Sebagai konsekuensinya, investasi dalam pengertian sebenarnya, menyumbangkan 22,4 persen dari PDB pada tahun 2007, meningkat dari 19,9 persen pada tahun 2000. Konsumsi swasta, komponen terbesar dari PDB, mengalami penurunan menjadi 57,6 persen pada tahun 2007 dari 61,6 persen pada tahun 2000. Ekspor, yang sebagian didorong oleh harga komoditas tertinggi dalam rekor sejarah seperti tembaga, minyak kelapa sawit, batu bara, dan gas bumi, dan juga pertumbuhan yang mantap sejak tahun 20004, tetapi pertumbuhan impor juga kuat, sehingga ekspor bersih hanya memberikan kontribusi kecil pada pertumbuhan PDB pada tahun 2007.

*Investasi menjadi
bagian yang lebih
besar dari PDB*

Tabel 1.2
Laju pertumbuhan komponen pengeluaran PDB, 2001–2007 (persentase)

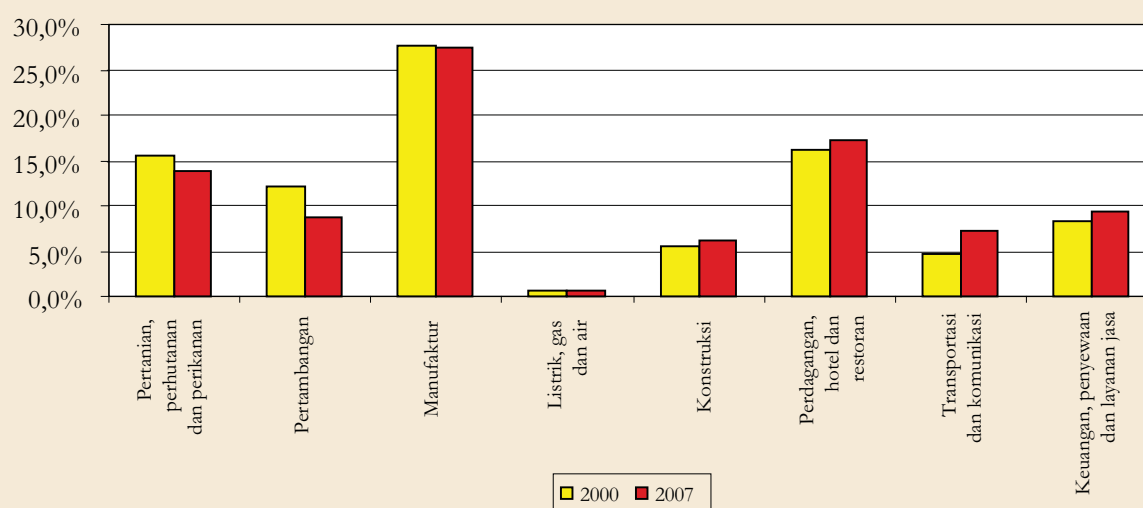
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Konsumsi swasta	3,5	3,8	3,9	5,0	4,0	3,2	5,0
Konsumsi pemerintah	7,6	13,0	10,0	4,0	6,6	9,6	3,9
Investasi	6,5	4,7	0,6	14,7	10,8	2,9	9,2
Eskpor	0,6	-1,2	5,9	13,5	16,4	9,2	8,0
Impor	4,2	-4,2	1,6	26,7	17,1	7,6	8,9

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sektor jasa berkembang, manufaktur bertahan

Industri manufaktur Indonesia, terlepas dari ketakutan akan melesunya industri ini karena persaingan internasional, bertahan. Keluaran manufaktur, dalam pengertian sebenarnya, meningkat 39,5 persen antara tahun 2000 dan 2007, dengan keluaran manufaktur sebagai bagian dari PDB stabil di kisaran 27,5 persen selama periode tersebut (Gambar 1.1). Keluaran ini meningkat dari angka pertengahan tahun 1990an, pada saat keluaran manufaktur menyumbangkan sekitar seperempat PDB nasional. Antara tahun 2000 dan 2007, pertumbuhan yang paling mencolok terjadi di sektor transportasi dan komunikasi, di mana pertumbuhan PDB meningkat dari 4,7 persen menjadi 7,3 persen. Berdasarkan pertumbuhan di sektor ini dan juga perdagangan, hotel, restoran dan jasa keuangan, penyewaan dan usaha, persentase jasa di PDB meningkat dari 38,5 persen pada 2000 menjadi 43,2 persen pada 2007.

Gambar 1.1
Persentase PDB menurut sektor pada harga konstan tahun 2000, 2000–2007



Sumber: Berdasarkan data BPS.

Ke depan, penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, kenaikan harga minyak dunia, dan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi di Indonesia pada Mei 2008 tampaknya akan memiliki dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan ini, Bank Indonesia telah menurunkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2008 dan mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan perekonomian akan bergerak lebih lambat dibanding tahun 2007¹. Secara khusus, tekanan inflasi dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan dan kaum miskin merupakan hal serius yang harus dihindarkan. Untuk menanggapi inflasi, yang tercatat sebesar 11,3 persen pertahunnya pada Juni 2008, Bank Indonesia menaikkan Suku Bunga Bank Indonesia sebanyak tiga kali dari 8,0 persen menjadi 8,75 persen sepanjang semester pertama tahun 2008. Hal ini meningkatkan ketakutan bahwa perusahaan akan meminjam lebih sedikit atau lebih memilih untuk berinvestasi pada obligasi pemerintah ketimbang berinvestasi pada kapasitas produksi; sebuah skenario yang terjadi pada 2005 saat inflasi meningkat lebih dari 17 persen, suku bunga masuk ke dalam kisaran dua digit dan pengangguran meningkat menjadi 11 persen.

Pertumbuhan ekonomi sepertinya akan menurun

Harga bahan pangan, yang telah meningkat secara dramatis selama setahun terakhir, menjadi berbahaya karena dapat membuat perkiraan inflasi menjadi kenyataan. Makanan dibeli dan dikonsumsi sehari-hari, sehingga lebih mudah bagi orang-orang untuk menyadari perubahan harga yang terjadi. Dengan kenyataan bahwa kaum miskin menggunakan bagian yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk berbelanja makanan, kenaikan harga makanan juga menyengsarakan kaum miskin, mengancam kemajuan berarti yang sudah dibuat dalam mengurangi kemiskinan.

Meningkatnya harga bahan pangan membuat inflasi menjadi kenyataan dan secara tidak adil mengakibatkan kaum miskin menderita

Kotak 1.1 **Mengurangi dampak peningkatan harga bahan bakar terhadap kaum miskin**

Pada Mei 2008, Pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar bersubsidi sebesar rata-rata 28,7 persen, sehubungan dengan meningkatnya harga minyak mentah di pasar global dan dampaknya terhadap APBN. Walaupun Indonesia adalah negara produsen minyak dan anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), pada saat ini Indonesia *net-importer* (jumlah impor lebih besar dari jumlah ekspor) minyak. Harga minyak tanah bersubsidi meningkat sebesar 33,3 persen, solar 27,9 persen dan minyak tanah 25 persen. Pemerintah diperkirakan akan menghabiskan 127 triliun rupiah, setara dengan sekitar US\$ 13,8 milyar, untuk subsidi energi, atau sekitar 11 persen dari pengeluaran negara.

Untuk membantu meringankan dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap kaum miskin, Pemerintah Indonesia pada saat yang bersamaan mulai melaksanakan program bantuan langsung tunai, yang bertujuan memberikan Rp 100,000 (sekitar US\$ 11) per bulannya dan 15 kilogram beras kepada 19,1 juta rumah tangga miskin hingga akhir tahun 2008.

1 Bank Indonesia (2008). Tersedia di http://www.bi.go.id/web/en/Siaran+Pers/sp_101908.htm.

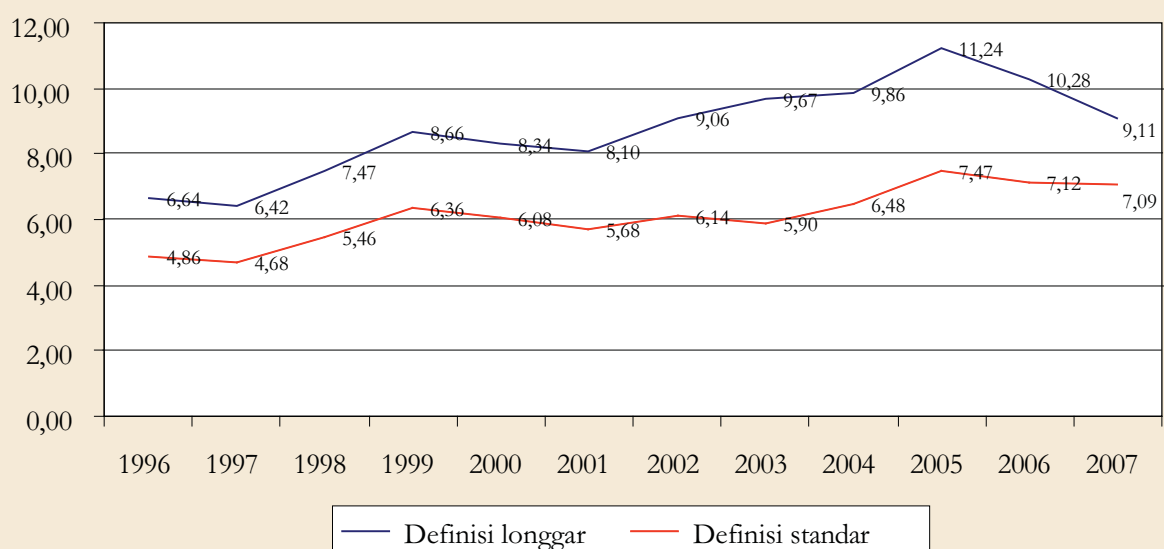
1.2 Kecenderungan pasar kerja

Pengangguran terutama menjadi tantangan bagi kaum muda dan mereka yang lebih berpendidikan

Antara tahun 2001 dan 2005, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat secara dramatis dari sekitar 8 juta menjadi 11,9 juta penduduk, sehingga mendorong tingkat pengangguran dari 8,1 persen menjadi 11,2 persen. Kecenderungan ini mulai berbalik pada tahun 2006 dan tingkat pengangguran berada di titik 9,1 persen pada tahun 2007 (Gambar 1.2). Namun, angka keseluruhan nasional diliputi oleh perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Tingkat pengangguran jauh lebih tinggi bagi perempuan dibanding laki-laki, walaupun kesenjangan ini berkurang secara signifikan pada 2007 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Gambar 1.3). Tingkat pengangguran kaum muda juga lima kali lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran dewasa pada 2007². Oleh karenanya, tantangan pengangguran di Indonesia sebagian besar adalah tantangan pengangguran kaum muda: kaum muda merupakan 56,5 persen dari pengangguran di Indonesia di mana mereka mewakili 20,5 persen dari angkatan kerja.

Lebih lanjut, pengangguran makin menjadi permasalahan bagi mereka yang berpendidikan lebih tinggi: pada tahun 2002 sekitar 40 persen dari mereka yang menganggur pernah menjalani pendidikan SMU atau setara atau lebih tinggi, tetapi persentase ini meningkat menjadi 50,3 persen pada tahun 2007. Kecenderungan ini sebagian mencerminkan kemampuan kaum muda yang berpendidikan, yang sebagian besar berasal dari keluarga yang lebih mampu, untuk tetap tidak memiliki pekerjaan serta mencari dan menunggu pekerjaan yang “baik”. Hal ini juga mencerminkan kurangnya permintaan atas kaum muda yang lebih berpendidikan, baik karena lambatnya kemajuan menuju jalur pertumbuhan yang lebih tinggi yang membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau karena ketidaksesuaian dan ketidakcocokan antara pendidikan dan keterampilan yang didapatkan.

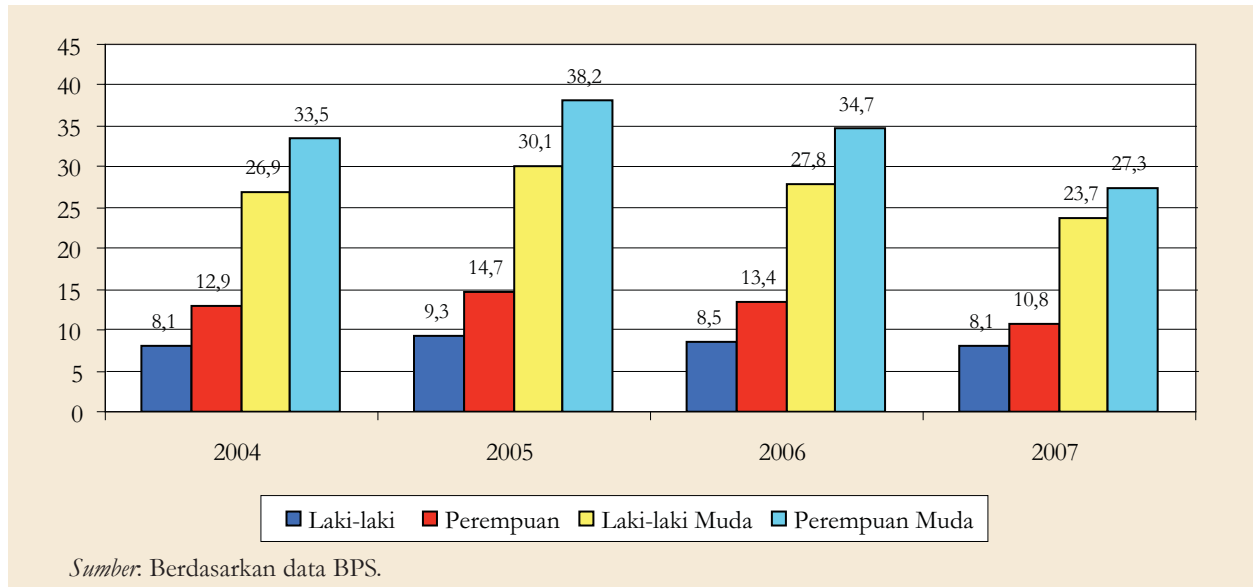
Gambar 1.2
Pengangguran, 1996–2007 (persentase)



Sumber: Berdasarkan data BPS.

2 Laporan ini, mengikuti praktik ILO dan PBB, mendefinisikan kaum muda sebagai mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun.

Gambar 1.3
Pengangguran: Kaum muda dan berdasarkan jenis kelamin, 2004–2007 (persentase)



Pada saat menilai kinerja umum pasar kerja dan perekonomian secara keseluruhan, tingkat pengangguran memberikan sebuah indikator yang informatif. Pendekatan pengangguran menjadi lebih relevan di Indonesia karena pemerintah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), telah berkomitmen untuk mengurangi angka pengangguran pada 2009. Karenanya, indikator ini juga memberikan ukuran kinerja pembangunan di Indonesia. Namun demikian, pengangguran juga merupakan ukuran kinerja pasar kerja yang tidak memadai: di negara-negara dengan perekonomian informal yang besar, seperti Indonesia, penyesuaian pasar kerja biasanya terjadi melalui perubahan upah dan kondisi kerja di sektor ekonomi informal, dan bukan melalui perubahan angka pengangguran. Menerapkan definisi pengangguran yang berbeda juga dapat menghasilkan pengetahuan yang berbeda mengenai kinerja pasar kerja, seperti yang terjadi di Indonesia.

*Pengangguran
sebuah indikator
yang informatif
tetapi tidak
memadai*

Gambar 1.2 menunjukkan angka pengangguran di Indonesia, baik menggunakan standar definisi internasional untuk pengangguran yang tidak memasukkan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan (seringkali disebut *discouraged workers*) dan definisi pengangguran yang lebih “lunak”, yang memasukkan *discouraged workers*.³ Seperti yang digambarkan pada gambar 1.2, versi pengangguran yang lebih lunak berkurang semenjak tahun 2006 dan telah kembali ke angka tahun 2002. Dengan menggunakan definisi baku, tingkat pengangguran hanya berkurang secara marjinal sejak tahun 2005, dan berada pada tingkat 7,1 persen pada tahun 2007 yang masih lebih tinggi dari angka tahun 2002. Perbedaan antara kedua angka tersebut menunjukkan perbaikan pada versi angka

*Jumlah
discouraged
workers menurun
tajam tetapi
sebagian besar
tertutupi dengan
kenaikan pencari
kerja aktif*

3 Definisi standar pengangguran, seperti yang digunakan oleh International Conference of Labour Statisticians (ICLS) adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, yang akhir-akhir ini mencari pekerjaan, dan pada saat ini bisa bekerja. Sejak tahun 2001, statistik pengangguran resmi di Indonesia mengikuti definisi pengangguran yang lunak, yang memasukkan *discouraged workers*. Berdasarkan definisi standar internasional, *discouraged workers* bukan merupakan bagian dari penduduk menganggur; mereka terletak di luar angkatan kerja.

pengangguran yang lebih lunak terutama disebabkan karena penurunan jumlah *discouraged workers*. Benar bahwa jumlah *discouraged workers* menurun lebih dari setengah, dari 3,6 juta pada tahun 2005 menjadi 1,3 juta pada tahun 2007. Di sisi lain, jumlah orang yang secara aktif mencari pekerjaan meningkat dari 6,8 juta menjadi 8,3 juta pada periode yang sama.

Indikator pasar kerja yang tidak terpengaruh oleh jumlah *discouraged workers* adalah rasio tenaga kerja – penduduk.⁴ Indikator ini memberikan informasi mengenai berapa banyak penduduk suatu negara yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa. Indikator ini juga merupakan salah satu dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan target Tujuan Pembangunan Milenium yang baru, menjadikan pekerjaan produktif dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan kaum muda, sebagai tujuan utama strategi pembangunan internasional dan nasional (Lihat Kotak 1.2).

Kotak 1.2 **Pekerjaan produktif dan layak: Target MDG baru**

Sebagai akibat dari meluasnya keyakinan bahwa pekerjaan yang layak merupakan satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, pekerjaan produktif dan layak bagi semua mulai digunakan sebagai target baru Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) 1, untuk mengurangi setengah jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim pada tahun 2015.

Sejumlah indikator untuk mengukur kemajuan pencapaian target ini juga telah dikembangkan dan diterima oleh masyarakat internasional. Ke-empat indikator tersebut adalah:

- Rasio tenaga kerja – penduduk untuk orang-orang berusia 15 tahun ke atas dan kaum muda (usia 15-24 tahun) berdasarkan jenis kelamin;
- Pekerjaan rentan;
- Persentase pekerja miskin (US\$1 per hari) dalam jumlah keseluruhan pekerja;
- Produktivitas tenaga kerja.

Lihat ILO: Indikator-Indikator Utama Pasar Kerja (KILM), Edisi ke-5, Bab 1a (Jenewa, ILO) untuk informasi lebih lanjut dan analisis regional bagi ke-empat indikator.

Pada saat ini perempuan berkesempatan mendapatkan pekerjaan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tetap masih ada potensi-potensi yang dianggap belum dimanfaatkan

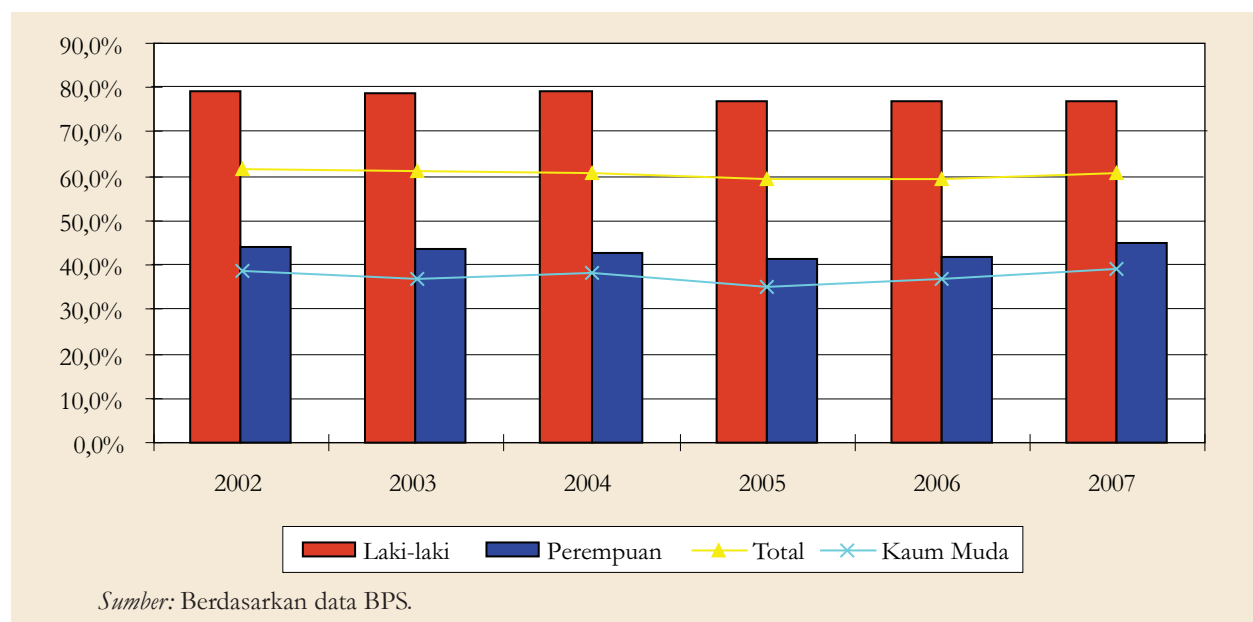
Rasio tenaga kerja – penduduk bagi perekonomian Indonesia, yang berada pada angka 60 persen, hanya menunjukkan sedikit perubahan selama enam tahun terakhir (Gambar 1.4). Di negara-negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi, seperti Indonesia, tren yang lebih disukai adalah peningkatan rasio, yang mengindikasikan bahwa orang-orang mencari dan mendapatkan pekerjaan. Rasio tenaga kerja - perempuan untuk tahun 2007, yang berada pada angka 44,8 persen, merupakan yang tertinggi selama enam tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini perempuan lebih berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana rasio untuk laki-laki mengalami penurunan secara

⁴ Rasio tenaga kerja – penduduk adalah bagian dari penduduk suatu negara dalam usia bekerja (15+) yang memiliki pekerjaan. Rasio tenaga kerja – penduduk tidak dipengaruhi oleh jumlah *discouraged workers*, tetapi dipengaruhi oleh perubahan distribusi usia dari penduduk.

umum antara tahun 2002 dan 2007⁵. Namun demikian, dalam rasio tenaga kerja - penduduk masih terdapat kesenjangan gender yang signifikan, dan oleh karenanya masih terdapat potensi perempuan yang belum dimanfaatkan.

Kecenderungan pada rasio tenaga kerja – penduduk untuk kaum muda perlu diinterpretasikan secara berhati-hati karena penurunan rasio ini bisa jadi merupakan perkembangan positif apabila hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi di Indonesia: antara tahun 1995 dan 2007, selama periode di mana keikutsertaan pada pendidikan menengah dan tinggi meningkat tajam. Baru-baru ini rasio tenaga kerja – penduduk menurun pada tahun 2006 tetapi telah meningkat lagi, sejalan dengan penurunan angka pengangguran pekerja dalam kelompok ini.

Gambar 1.4
Rasio Tenaga kerja – penduduk, 2002- 2007 (persentase)



Kotak 1.3 **Program “3 in 1” untuk mendukung penciptaan lapangan kerja**

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Kamar Dagang dan Industri, telah mulai melaksanakan program “3 in 1” yang meliputi penguatan pelatihan, sertifikasi dan penempatan.

Melalui program ini, pemerintah bermaksud untuk meremajakan balai latihan kerja dan memberikan subsidi bagi penyedia pelatihan swasta, selain langkah-langkah lainnya. Program ini juga bermaksud untuk memperbaiki sistem sertifikasi nasional dan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) menetapkan standar mutu untuk 12 profesi, meliputi ujian kompetensi dan penerbitan sertifikat. Untuk mendukung penempatan baik di dalam maupun luar negeri, program ini mendukung balai latihan kerja dan kantor tenaga kerja regional dan lokal untuk memberikan informasi kepada peserta pelatihan dan pencari kerja mengenai lowongan pekerjaan dan informasi pasar kerja.

5 Kecenderungan ini secara umum konsisten dengan kecenderungan dalam angka partisipasi angkatan kerja (Lihat Lampiran Statistik).

*Jasa seperti ini akan
menjadi sektor
dominan untuk
lapangan kerja*

Pertanian, pada angka 41,2 persen pada 2007, masih menjadi sektor utama yang menyediakan persentase terbesar lapangan kerja. Namun, antara tahun 2002 dan 2007, terdapat pergeseran yang cukup jelas pada lapangan kerja dari pertanian ke jasa (lompatan ketenagakerjaan di industri, dengan persentase stabil pada 19 persen), dan apabila kecenderungan ini terus berlanjut, jasa seperti ini akan menggantikan pertanian sebagai sektor dominan dalam total ketenagakerjaan. Kecenderungan nasional ini didorong oleh pergeseran sektoral terutama untuk perempuan, dengan persentase ketenagakerjaan di bidang jasa meningkat secara signifikan dari 38,8 persen pada 2002 menjadi 43,6 persen pada 2007. Bagi perempuan, jasa sudah memberikan bagian terbesar dalam lapangan kerja. Dalam sektor jasa, sejalan dengan kecenderungan PDB, pekerjaan perempuan di sub-sektor transportasi dan komunikasi telah meningkat dua kali lipat antara tahun 2002-2007. Namun, sebagian besar perempuan yang bekerja di bidang jasa bekerja di sub-sektor perdagangan (64 persen).

*Pola perdagangan
mempengaruhi
ketenagakerjaan*

Di dalam industri, jumlah orang yang dipekerjakan di sektor manufaktur turun dari antara tahun 2002 dan 2004, tetapi meningkat lagi setelahnya. Totalnya mencapai 12,4 juta orang pada tahun 2007, lebih tinggi dari angka tahun 2002, walaupun persentase manufaktur dalam total tenaga kerja di tahun 2007, pada angka 12,4 persen, masih tetap lebih rendah dari angka tahun 2002 (13,2 persen). Dalam industri manufaktur, usaha besar dan menengah di sub-sektor tekstil dan pakaian; produk karet dan plastik; dan radio, televisi dan peralatan komunikasi menambah tenaga kerja antara tahun 2003 dan 2006, sementara sub-sektor produk perkayuan; kimia dan produk kimia; dan mesin dan peralatan listrik semuanya mengurangi jumlah tenaga kerja. Pola perdagangan mempengaruhi hasil ketenagakerjaan tersebut. Sebagai contoh, nilai ekspor karet dan plastik meningkat 123 persen pada periode yang sama, mendukung pertumbuhan ketenagakerjaan di sektor ini, sementara nilai ekspor produk kayu hanya bertumbuh sebesar 5 persen pada periode yang sama, sehingga menahan pertumbuhan lapangan kerja.

Tabel 1.3
Distribusi tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin, 2002–2007 (persentase)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	44,3	46,4	43,3	44,0	42,0	41,2
Industri	18,8	17,7	18,0	18,8	18,6	18,8
Jasa	36,9	35,9	38,7	37,3	39,4	40,0
<i>Laki-laki</i>						
Pertanian	43,7	45,7	42,6	43,8	42,5	41,1
Industri	20,4	19,1	20,1	20,3	20,3	21,0
Jasa	35,8	35,1	37,3	36,0	37,1	37,8
<i>Perempuan</i>						
Pertanian	45,4	47,5	44,6	44,3	41,1	41,4
Industri	15,8	15,2	14,2	15,9	15,3	15,0
Jasa	38,8	37,3	41,2	39,8	43,5	43,6

Sumber: Berdasarkan data BPS.

Sebagai tambahan dari pekerja yang bekerja di Indonesia, terdapat 4,3 juta pekerja migran resmi Indonesia yang bekerja di luar negeri dan diperkirakan terdapat 2 juta pekerja tidak resmi pada tahun 2007, menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).⁶ Hal ini diakibatkan dorongan aktif untuk meningkatkan migrasi di luar negeri sebagai upaya mengurangi tekanan pada pasar kerja domestik. Sebagai gambaran, pada tahun 2004, lebih dari 360.000 pekerja ditempatkan ke luar negeri dengan total devisa pada tahun itu sebesar US\$ 1,9 milyar. Namun, pada tahun 2007, jumlah pekerja yang ditempatkan hampir dua kali lebih besar, yaitu 696.000 dengan total devisa US\$ 5,8 milyar. Pada 2008, pemerintah menargetkan penempatan satu juta pekerja di luar negeri. Pertumbuhan jumlah pekerja migran dan arus devisa yang cepat membawa implikasi penting terkait dengan pengelolaan migrasi secara positif dan protektif dan memastikan bahwa devisa yang dihasilkan digunakan secara efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Jumlah pekerja migran di luar negeri mencapai angka tertinggi

Indikator-indikator ketenagakerjaan di atas, walaupun bermanfaat, tidak memberikan indikasi mengenai kualitas pekerjaan dan karenanya tidak memberikan gambaran defisit pekerjaan yang layak.⁷ Kriteria standar bekerja, yang digunakan oleh Indonesia, adalah bekerja selama sedikitnya *satu jam* selama periode waktu tertentu. Kriteria bekerja satu jam ini meliputi pekerjaan marjinal dan berpendapatan rendah dengan lama bekerja satu atau dua jam setiap minggunya, juga berupa pekerjaan jangka pendek dan pekerjaan purna waktu dengan pendapatan yang lebih tinggi dan tunjangan pekerjaan yang lebih baik. Karenanya, memiliki pekerjaan sedikitnya satu jam selama periode waktu tertentu tidak selalu memberikan gambaran pekerjaan yang menghasilkan. Jam kerja bagi orang setengah menganggur terkait dengan kurangnya jumlah jam kerja yang dilakukan dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan kemampuan dan keinginannya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini memberikan gambaran kurang optimalnya penggunaan kapasitas produksi angkatan kerja dan salah satu aspek dari kualitas pekerjaan.⁸

Pengangguran/ bekerja hanya memberikan sedikit gambaran mengenai kualitas pekerjaan

Setengah menganggur secara tidak sukarela yang terkait dengan waktu (yaitu bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu) di Indonesia terus meningkat dari 11,9 persen angkatan kerja pada 2002 menjadi 13,6 persen pada 2007 (Gambar 1.5).⁹ Penurunan pengangguran pada akhir-akhir ini telah tertutupi oleh peningkatan angka setengah menganggur sehingga jumlah mereka yang “bekerja penuh” (total bekerja kurang dari setengah menganggur) pada 2007 sebenarnya di bawah angka tahun 2002 sementara angka pengangguran antara kedua periode tersebut kurang lebih sama. Hal ini sekali lagi menggambarkan keterbatasan angka pengangguran dalam menangkap dinamika pasar kerja.

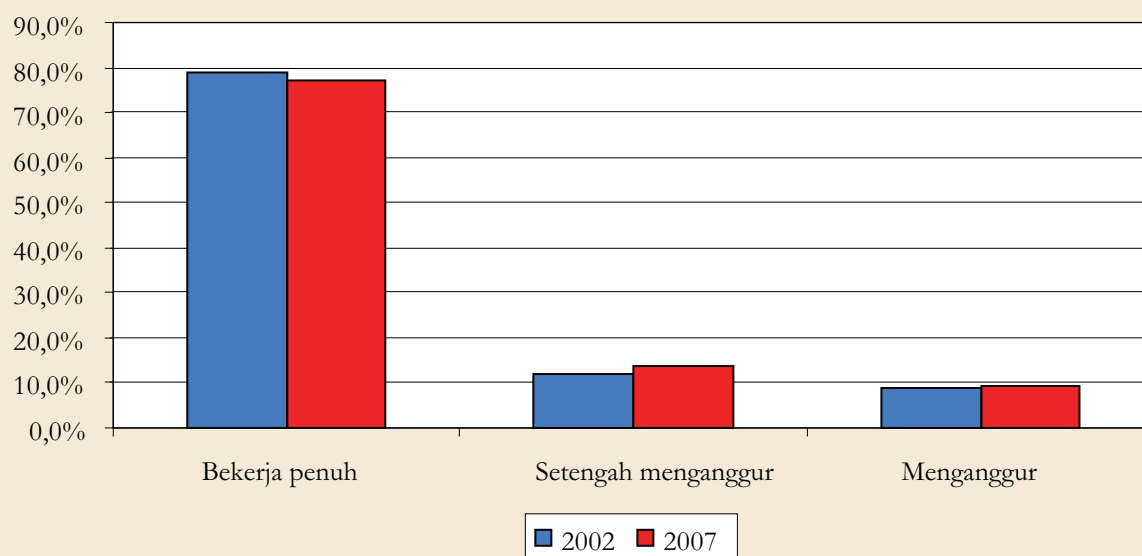
6 Jakarta Post: “Creative workers sought to fill overseas vacancies”, 3 Mei 2008.

7 Lihat ILO: *Indikator-indikator Kunci Pasar Ketenagakerjaan* (Edisi Ke-5), Bab 1c untuk pembahasan yang lebih komprehensif mengenai bergerak melampaui dikotomi bekerja/menganggur.

8 Sebagai tambahan dari jam kerja yang tidak mencukupi (setengah menganggur yang terkait dengan waktu), setengah menganggur juga dapat meliputi ketidakefektifan penggunaan terkait dengan ketidakcukupan pendapatan, penggunaan keterampilan dan/atau pendidikan seseorang dan produktivitas yang rendah. Karena kesulitan untuk menghitung aspek-aspek ini, setengah menganggur yang terkait dengan waktu adalah komponen yang paling umum digunakan dalam setengah menganggur.

9 Sebagai tambahan dari setengah menganggur secara tidak sukarela, 14,1 persen angkatan kerja secara sukarela setengah menganggur pada tahun 2007.

Gambar 1.5
Distribusi status angkatan kerja, 2002 dan 2007



Sumber: Berdasarkan data BPS.

*Kerentanan menurun
sedikit akibat
pertumbuhan sektor
pekerjaan formal
yang lebih cepat dari
sektor informal*

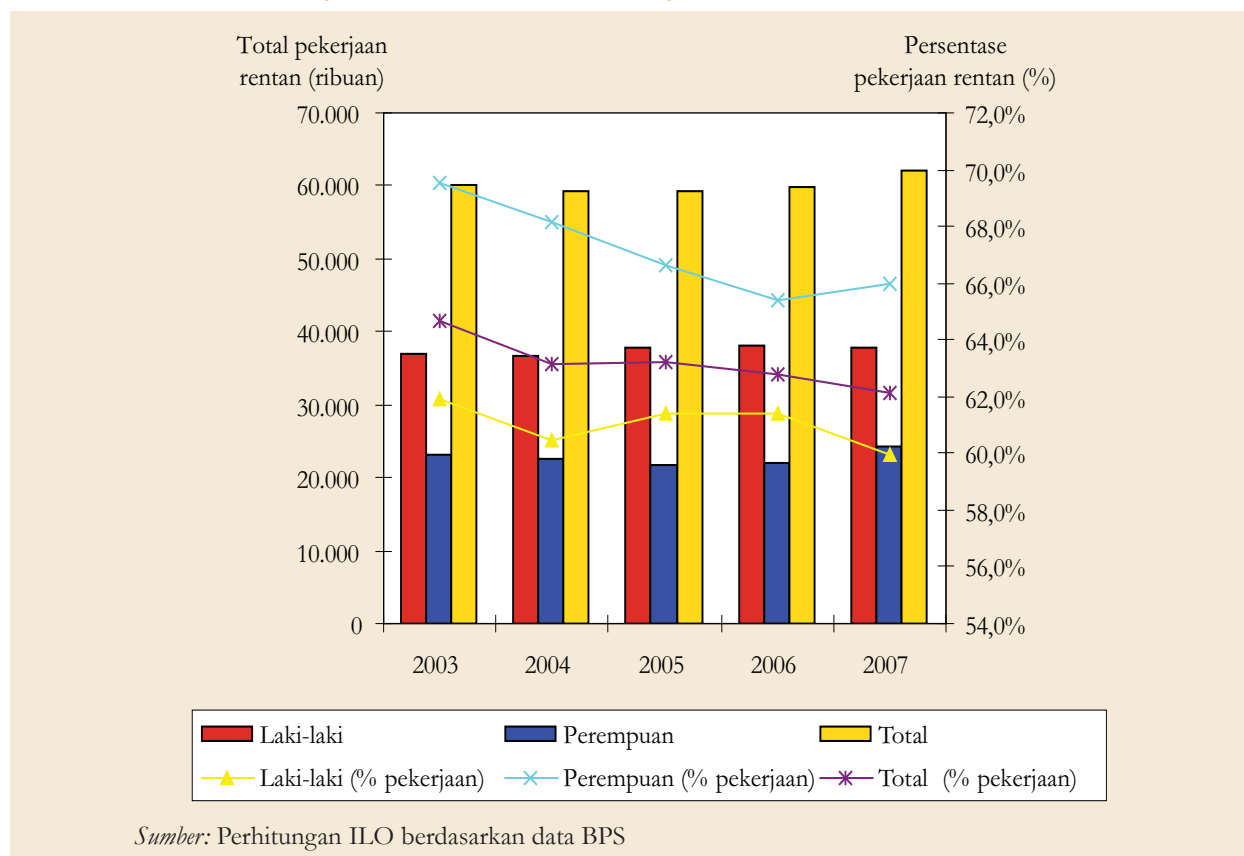
Jumlah pekerjaan rentan, sebagai salah satu indikator MDG, merujuk kepada jumlah wirausahawan dan anggota keluarga yang berkontribusi sebagai persentase dari total pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pekerjaan dan informalisasi pasar kerja. Namun pekerjaan rentan dalam laporan ini merujuk pada perhitungan Badan Pusat Statistik mengenai kegiatan informal, yang dihasilkan dari tabulasi silang antara status pekerjaan dan pekerjaan utama, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai derajat informalisasi di Indonesia.¹⁰

Pekerjaan rentan menurun dari 64,7 persen pada 2003 menjadi 62,1 persen pada 2007 (Gambar 1.6). Penurunan kerentanan didukung perluasan lapangan kerja di sektor formal, yang tumbuh dengan tingkat rata-rata 3,8 persen antara tahun 2003 dan 2007, dibanding dengan pertumbuhan pekerjaan informal 0,9 persen. Persentase perempuan di pekerjaan rentan walaupun tetap lebih tinggi dari laki-laki, mengalami penurunan yang cukup berarti dari tahun 2003 ke tahun 2006, meski terdapat peningkatan kecil pada tahun 2007. Hal ini merupakan akibat dari kenaikan 10 persen pada pekerjaan informal dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa peningkatan hasil pasar kerja untuk perempuan, terkait dengan penurunan angka pengangguran dan peningkatan rasio tenaga kerja – penduduk seperti yang dijabarkan pada bagian sebelumnya, bisa memiliki pengertian yang sedikit berbeda karena pekerjaan yang didapatkan perempuan sepertinya bersifat kurang layak dipandang dari segi rendahnya kualitas, produktivitas dan pendapatan. Pekerjaan di perekonomian informal seringkali tidak diakui oleh hukum, memberikan sedikit atau tiadanya perlindungan sosial dan biasanya ditandai dengan ketiadaan hak di tempat kerja dan kurangnya keterwakilan dan suara di tempat kerja.¹¹

10 Lihat Lampiran I untuk informasi lebih lanjut tentang perhitungan BPS mengenai kegiatan informal.

11 ILO: *Pekerjaan layak dan ekonomi informal*, Laporan IV, Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-90, Jenewa, 2002, p. 4.

Gambar 1.6
Pekerjaan rentan berdasarkan jenis kelamin, 2003–2007



Informalisasi makin menjadi fenomena perkotaan, sebagai akibat migrasi dari pedesaan ke perkotaan, dengan angka pekerjaan informal perkotaan meningkat sebesar 5,3 persen antara tahun 2003 dan 2007, dibandingkan dengan pertumbuhan 2,8 persen di area pedesaan. Namun, informalisasi masih tetap menjadi fenomena pedesaan, sebuah indikasi mengenai besarnya sektor pertanian subsisten di Indonesia, di mana daerah pedesaan menyumbangkan hampir tiga perempat pekerjaan rentan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya yang secara khusus menargetkan pertanian dan perekonomian pedesaan, di mana sebagian besar kaum rentan bermukim. Kenaikan harga makanan secara tajam di Indonesia dan di seluruh dunia selama setahun terakhir menggarisbawahi perlunya pertanian berkelanjutan yang memberikan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga mereka.

Perekonomian informal perkotaan meningkat tetapi sebagian besar yang paling rentan terdapat di sektor pertanian

Mengingat sifat pasar kerja yang kompleks dan beragam, upaya-upaya ini akan memerlukan pendekatan terpadu yang meliputi promosi produktivitas dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja dan dialog sosial.¹² Dengan dorongan ke arah desentralisasi di Indonesia, upaya-upaya ini juga memerlukan pendekatan *teritorial* dalam mempromosikan pembangunan pedesaan. Pendekatan ini mempertimbangkan kemajuan semua kegiatan ekonomi di daerah pedesaan, tidak hanya pertanian saja; mendorong keterlibatan masyarakat lokal

Mempromosikan pekerjaan yang layak di area pedesaan memerlukan pendekatan komprehensif dan teritorial

¹² Lihat ILO: *Promotion of rural employment*, Laporan IV, Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-97, Jenewa, 2008, untuk informasi lebih lanjut mengenai pendekatan yang terpadu untuk mempromosikan pekerjaan layak di daerah pedesaan.

dan memperkuat lembaga-lembaga lokal; menggunakan pendekatan terkoordinasi dan strategis berdasarkan potensi dan aset teritorial; dan memanfaatkan identitas teritorial sebagai aset pembangunan.¹³

Kemiskinan masih merupakan masalah bagi sebagian besar orang yang bekerja

Daerah pedesaan juga merupakan tempat di mana sebagian besar kaum miskin di Indonesia bermukim, yaitu sebesar 63,5 persen. Kemiskinan, yang meningkat secara signifikan seiring dengan krisis keuangan Asia, telah menurun ke tingkat sebelum krisis, walaupun jumlah penduduk miskin, sebesar 37,2 juta pada 2007, masih tetap lebih tinggi dari angka penduduk miskin pada tahun 1996 (34,5 juta).¹⁴ Kemiskinan di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang, masih merupakan permasalahan yang terkait dengan orang-orang yang bekerja, yang diperkirakan menggambarkan bahwa kurang dari 15 persen kaum miskin memiliki kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan bukan karena kurangnya kegiatan perekonomian, tetapi lebih kepada sifat kegiatan yang tidak produktif dan berakibat pada ketidakcukupan pendapatan untuk mengangkat pekerja miskin dan keluarganya dari kemiskinan. Apabila kaum miskin yang bekerja, didefinisikan sebagai proporsi pekerja yang hidup di sebuah rumah tangga yang anggota-anggotanya diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan, memiliki kesempatan untuk menjadi lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak, kemiskinan akan menurun, sehingga pekerjaan layak dimasukkan sebagai indikator MDG untuk mengurangi kemiskinan.

Sekitar setengah dari mereka yang bekerja diperkirakan miskin

Antara tahun 2002 dan 2006 diperkirakan terdapat peningkatan pekerja miskin (pada US\$ 1 per hari), sementara persentase pekerja miskin di keseluruhan tenaga kerja tetap pada angka 8,2 persen. Pada garis kemiskinan US\$ 2 per hari, 54,6 persen pekerja Indonesia atau 52,1 juta pekerja tidak menghasilkan cukup untuk mengangkat diri mereka dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan.

Tabel 1.4 Kemiskinan pekerja, 2002 dan 2006

	Pekerja miskin pada US\$1 per hari		Pekerja miskin pada US\$2 per hari	
	Juta	Persentase dari total tenaga	Juta	Persentase dari total tenaga
2002	7,6	8,2	52,8	57,6
2006	7,9	8,2	52,1	54,6
<i>Sumber: Perhitungan ILO</i>				

¹³ *ibid.*

¹⁴ Statistik kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan pendapatan nasional, yang kurang lebih setara dengan *Purchasing Power Parity* (PPP) US\$1,55 per hari. Garis kemiskinan berdasarkan nilai Rupiah per kapita dari kebutuhan perorangan untuk memenuhi kebutuhan minimum akan makanan (2100 kcal/hari).

Kotak 1.4

Keterbatasan data dari perkiraan pekerja miskin yang dihasilkan secara makro

Mengingat keterbatasan pengukuran langsung kemiskinan di antara penduduk bekerja di Indonesia, perkiraan pekerja miskin pada laporan ini dihasilkan dari perkiraan secara makro yang mengalikan angka kemiskinan dengan angkatan kerja berdasarkan asumsi sederhana.

Perkiraan yang lebih dapat diandalkan dan pasti mengenai pekerja miskin bisa didapatkan dari data tingkat mikro survei rumah tangga, di mana hubungan langsung dapat ditarik antara status kemiskinan dan status pekerjaan. Kesenjangan data seperti ini menunjukkan perlunya berinvestasi dalam kapasitas statistik untuk menyediakan informasi pasar kerja yang lebih mutakhir dan terpercaya, sehingga kebijakan dapat ditargetkan secara sesuai dan dilaksanakan secara efisien.

Lihat Kapsos, S., Micro-and Macro-based approaches for estimating working poverty, Tulisan dibuat untuk Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Sosial dan Ekonomi untuk Asia dan Pasifik, Komite untuk Penanggulangan Kemiskinan, Dokumen No. E/ESCAP/CPR(4)/5, 19 Sep. 2007 untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran pekerja miskin.

Kotak 1.5

Pekerja anak di Indonesia

Kemiskinan merupakan penyebab dan konsekuensi dari pekerja anak. Survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2007 mengindikasikan bahwa terdapat lebih dari 1 juta anak yang bekerja berusia antara 10-14 tahun di Indonesia (60 persen laki-laki dan 40 persen perempuan). Mayoritas dari anak-anak ini bekerja di sektor pertanian (62 persen), diikuti dengan perdagangan (17 persen) dan manufaktur (13 persen). Pekerja anak mengakibatkan penurunan partisipasi dalam pendidikan dasar dan berdampak buruk pada tingkat melek huruf kaum muda, sehingga memperparah permasalahan ketenagakerjaan kaum muda

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai langkah untuk mengatasi pekerja anak termasuk memperluas akses ke pendidikan, dengan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi biaya pendidikan rumah tangga miskin, memperluas pendidikan di daerah pedesaan dan memberikan subsidi tunai bagi rumah tangga miskin dengan syarat anak-anak usia sekolah bersekolah. Namun demikian, lingkungan inflasi pada saat ini, yang membuat pendidikan menjadi semakin tidak terjangkau, terutama untuk kaum miskin dan jumlah pekerja anak yang cukup tinggi pada saat ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan komitmennya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, terutama dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak secara efektif. ILO melalui Program Terikat Waktu untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Kaum Muda (EAST) mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya ini.

Catatan: Usia bekerja minimum yang legal di Indonesia adalah 15 tahun.

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sangat penting bagi pengurangan kemiskinan

Dengan mayoritas pekerja di Indonesia memiliki jam kerja yang panjang dan bekerja keras tetapi memiliki pekerjaan dengan produktivitas rendah, pertumbuhan produktivitas memberikan jalan keluar utama dari kemiskinan. Produktivitas tenaga kerja juga penting bagi angkatan kerja yang lebih luas karena sebagian keuntungan dari peningkatan produktivitas dapat didistribusikan kepada para pekerja melalui upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, jam kerja yang lebih rendah dan/atau lebih banyak investasi dalam sumber daya manusia. Oleh karenanya, produktivitas tenaga kerja dapat digunakan untuk menilai kemungkinan lingkungan perekonomian suatu negara untuk menciptakan dan mempertahankan kesempatan pekerjaan yang layak.

Total produktivitas tenaga kerja, yang diukur sebagai keluaran per orang yang bekerja, meningkat sebesar 30,2 persen atau dengan rata-rata tahunan 4,3 persen per tahun antara tahun 2000 dan 2007, sebagian didukung oleh peralihan dari pekerjaan di sektor pertanian dengan nilai tambah rendah ke pekerjaan di sektor industri dan jasa dengan nilai tambah yang lebih tinggi (Tabel 1.5). Sementara keluaran per pekerja di sektor jasa masih tetap setengah dari sektor industri, pertumbuhan produktivitas dalam perekonomian secara keseluruhan terutama didorong oleh pertumbuhan di sektor jasa yang rata-rata tumbuh 4,7 persen per tahun dibanding pertumbuhan di sektor pertanian dan industri, yaitu sekitar 2,6 persen.

Tabel 1.5
Keluaran per pekerja pada tahun 2000 dan 2007

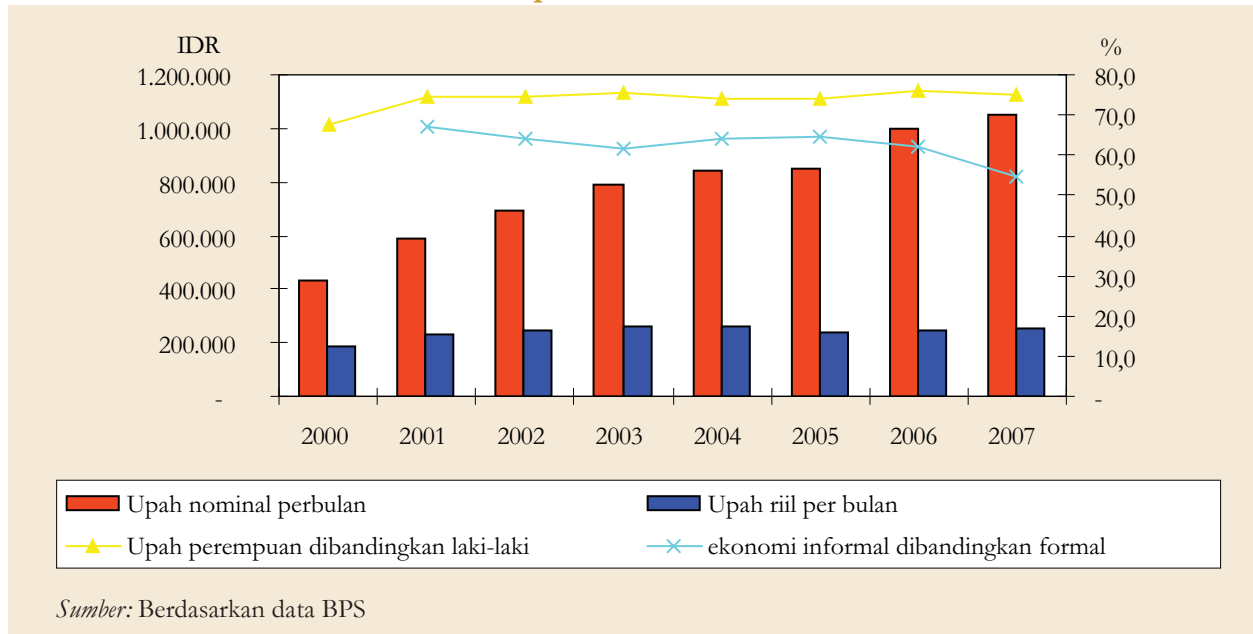
	Keluaran per pekerja (juta Rupiah pada harga konstan tahun 2000)		Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan (%) rata-rata tahunan	Pertumbuhan Pekerjaan (%) rata-rata tahunan
	2000	2007	2000-2007	2000-2007	2000-2007
Perekonomian total	14,9	19,5	30,2	4,3	1,6
Pertanian	5,5	6,5	18,9	2,7	0,2
Industri	37,8	44,6	18,2	2,6	2,8
Jasa	15,9	21,1	33,0	4,7	2,8

Sumber: Perhitungan ILO berdasarkan data BPS

Pertumbuhan produktivitas tidak menghasilkan upah riil yang lebih tinggi

Sejauh mana pertumbuhan produktivitas diterjemahkan menjadi upah yang lebih tinggi? Upah nominal rata-rata di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2000 dan 2007. Namun, kendati upah riil sedikit meningkat antara tahun 2000 dan 2003, angka ini tetap stagnan setelah tahun 2003 (Gambar 1.7). Hal ini mengindikasikan bahwa standar hidup pekerja dan daya beli mereka tidak mengalami perbaikan signifikan walaupun terdapat peningkatan efisiensi tenaga kerja.

Gambar 1.7
Upah, 2000–2007



Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesenjangan upah antara pekerja berketerampilan rendah dengan pekerja berketerampilan tinggi. Dengan menggunakan data perekonomian formal/informal sebagai proxy tingkat keterampilan, upah riil rata-rata di sektor informal adalah 68 persen dari sektor formal pada tahun 2001, tetapi rasio ini menurun menjadi 55 persen pada tahun 2007. Data upah tingkat industri juga menunjukkan peningkatan perbedaan upah: upah rata-rata di sektor pertanian setara dengan 34 persen upah di sektor keuangan dan jasa bisnis pada tahun 1994. Namun, perbandingan ini terus menurun, mencapai angka 27 persen pada 2007. Koefisien Gini, sebuah indikator umum untuk perbedaan pendapatan, juga meningkat dari 0,32 pada 2000 menjadi 0,35 pada 2006.¹⁵ Lebih lanjut, kesenjangan upah gender, yang telah berkurang dengan perempuan mendapatkan 69 persen dari upah laki-laki pada 1995 menjadi 75 persen pada 2001, tidak bergerak dari angka ini semenjak itu.

*Melebarnya
perbedaan upah
sementara
kesenjangan gender
tetap*

1.3 Kecenderungan dan implikasi kebijakan

Dilihat secara keseluruhan, analisis kecenderungan dari berbagai indikator perekonomian, sosial, dan pasar kerja mengindikasikan hal-hal berikut ini:

- ♦ Pertumbuhan ekonomi yang ajeg di tahun-tahun terakhir tidak serta-merta menghasilkan pasar kerja yang lebih baik. Jumlah pengangguran, dengan tidak memasukkan *discouraged workers*, tetap di kisaran tujuh persen, persentase pekerja penuh telah menurun sejak tahun 2002 seiring dengan peningkatan setengah menganggur secara tidak sukarela, dan rasio tenaga kerja – penduduk juga hampir tidak berubah selama enam tahun terakhir. Lebih lanjut lagi, terlepas dari peningkatan produktivitas, upah riil mengalami kemandekan

15 Koefisien Gini memiliki nilai antara 0 dan 1, di mana 0 setara dengan kesetaraan pendapatan sempurna dan 1 setara dengan ketidaksetaraan pendapatan sempurna.

selama tahun-tahun belakangan ini, yang mengindikasikan bahwa standar hidup kebanyakan pekerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

- ♦ Pekerja miskin menanggung dampak terburuk dari hasil-hasil ini. Tidak hanya mereka mendapatkan upah yang rendah, pekerjaan dengan produktivitas rendah, mereka juga mengalami penurunan standar hidup dan daya beli secara signifikan dengan peningkatan harga makanan dan bahan bakar.
- ♦ Di sisi baiknya, jumlah *discouraged workers* (orang yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak memenuhi kualifikasi) telah menurun secara tajam, walaupun hal ini sebagian besar tertutupi oleh peningkatan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Kecenderungan seperti ini mengindikasikan bahwa *discouraged workers* sudah mulai mencari pekerjaan lagi dengan perbaikan kondisi perekonomian. Selan itu, akhir-akhir ini pekerjaan rentan telah menurun dan pertumbuhan pekerjaan sektor formal lebih cepat ketimbang sektor informal. Produktivitas tenaga kerja telah meningkat secara stabil dalam tahun-tahun belakangan, didorong oleh pertumbuhan di sektor jasa.
- ♦ Hasil pasar kerja untuk perempuan pada tahun-tahun belakangan meningkat walaupun tidak secara besar-besaran, seperti yang diindikasikan pada penurunan angka pengangguran perempuan, peningkatan rasio tenaga kerja – penduduk, pengurangan informalisasi secara signifikan dan kesenjangan upah yang telah berkurang antara tahun 1995 dan 2007. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan gender yang signifikan pada semua indikator ini.
- ♦ Kaum muda yang berusia antara 15-24 tahun terus berjuang melawan ketidakadilan di pasar kerja. Sementara kaum muda mewakili 21 persen angkatan kerja, mereka merupakan 56 persen dari total pengangguran.
- ♦ Jumlah pekerja migran di luar negeri meningkat secara signifikan dan sepertinya akan terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah dan faktor pendorong serta penarik lainnya.
- ♦ Persentase jasa pada total pekerjaan meningkat pada tahun-tahun belakangan. Saat ini jasa telah memberikan sebagian besar pekerjaan bagi perempuan dan sepertinya hal yang sama akan terjadi bagi laki-laki. Pekerjaan di sektor industri mengalami kemandekan pada tahun-tahun terakhir, tetapi sebagian dikarenakan oleh pola perdagangan dan beragamnya hasil pekerjaan di sektor manufaktur.
- ♦ Setengah dari pekerja adalah pekerja miskin dan sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan. Namun, kemiskinan perkotaan dan informalisasi meningkat secara pesat. Ketidakadilan pendapatan meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat keterampilan dan Koefisien Gini.

Kecenderungan-kecenderungan ini menarik perhatian kepada beberapa hal yang perlu dipikirkan oleh pembuat kebijakan.

Pertama, tantangan multidimensional mengindikasikan kebutuhan atas strategi ketenagakerjaan yang komprehensif dan terkoordinir, yang melibatkan penempatan pekerjaan layak dan produktif sebagai pusat dari kebijakan ekonomi dan sosial

melalui peningkatan koordinasi antara berbagai kementerian.¹⁶ Di Indonesia yang terdesentralisasi, strategi ketenagakerjaan nasional harus memberikan pedoman kepada provinsi dan daerah tempat pelaksanaan akan dilakukan. Strategi yang komprehensif akan perlu untuk mengidentifikasi target-target yang sesuai, yang lebih luas dari sekedar angka pengangguran. Target-target yang sesuai, seperti fokus pada penciptaan pekerjaan dan bukan pengurangan pengangguran, juga perlu untuk dipertimbangkan dalam pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah berikutnya.

Kedua, dengan mayoritas angkatan kerja berada di sektor pertanian dan banyak dari pekerja ini adalah pekerja miskin dan paling rentan, perlu adanya fokus baru bagi sektor ini melalui pendekatan terpadu yang meliputi peningkatan produktivitas dan pekerjaan, perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja dan dialog sosial, selain juga mendorong kegiatan dan pekerjaan non-pertanian di pedesaan. Krisis harga pangan baru-baru ini menekankan terbaikannya sektor ini di seluruh dunia.

Pada saat yang bersamaan, akan perlu untuk membangun kapasitas di sektor-sektor perekonomian yang tumbuh secara dinamis seperti misalnya jasa.¹⁷ Pertumbuhan produktivitas dan pekerjaan di sektor jasa yang berkembang secara khusus memerlukan strategi pengembangan keterampilan yang sesuai, termasuk dalam interaksi dan sikap terhadap pelanggan, mengingat seringnya interaksi antara karyawan dan pelanggan di sektor ini.¹⁸ Oleh karenanya strategi ketenagakerjaan nasional yang disebutkan di atas harus meliputi isu-isu ini, strategi keterampilan dan peningkatan ketenagakerjaan yang bersifat spesifik bagi sektor, baik di sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan di sektor perekonomian yang tumbuh secara dinamis, dan strategi untuk menghubungkan keduanya.

Tiga, investasi harus lebih berupa lapangan kerja yang berbasis tenaga kerja untuk meringankan tekanan terhadap pasar kerja, terutama karena pertumbuhan ekonomi sepertinya akan melambat karena tekanan inflasi dan penurunan perekonomian dunia. Dengan dorongan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur di Indonesia dan untuk memastikan bahwa kenaikan investasi swasta pada saat ini dapat menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan yang signifikan, pemerintah dapat memimpin dalam mengarusutamakan pendekatan ramah-pekerja kepada investor. Pengalaman terkait dengan pendekatan padat karya untuk investasi infrastruktur telah menunjukkan bahwa pendekatan ini bisa menjadi lebih efektif dari segi biaya secara ekonomi apabila dibandingkan dengan pendekatan berbasis peralatan.¹⁹ Selain bertujuan untuk menghubungkan daerah pedesaan dengan pusat-pusat perkotaan dan di masyarakat miskin, investasi seperti ini juga memberikan

16 Agenda Ketenagakerjaan Global ILO dapat memberikan kerangka kerja yang informatif untuk pengembangan strategi ketenagakerjaan. Lihat ILO: *Implementing the Global Employment Agenda: Employment strategies in support of decent work*, "Vision" document, Geneva, 2006, untuk informasi lebih lanjut tentang Agenda Ketenagakerjaan Global.

17 Lihat ILO: *World Employment Report 2004-05: Employment, productivity and poverty reduction*, Geneva, 2005.

18 Lihat ILO: *Sustaining productivity and competitiveness on a foundation of decent work*, Makalah ini dipersiapkan untuk the Asian Employment Forum: Growth, Employment and Decent Work, 2008.

19 Lihat ILO: *Making infrastructure employment friendly*, Jenewa, 2007, untuk ringkasan pengalaman seperti ini.

kesempatan untuk bekerja agar dapat keluar dari kemiskinan. Selanjutnya, mengingat penekanan yang diberikan oleh perusahaan multinasional kepada tanggung jawab sosial perusahaan, terdapat kesempatan untuk mendorong investor asing untuk menggunakan teknologi dan proses yang lebih padat karya yang dapat diserap oleh perekonomian domestik dan karenanya berkontribusi pada pembangunan, sebagai tambahan dari mendorong praktik-praktik yang layak di tempat kerja dengan tujuan untuk menarik investasi asing dan meningkatkan produktivitas.

Empat, usaha yang berkelanjutan adalah sumber utama pertumbuhan, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak. Oleh karenanya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk usaha yang berkelanjutan penting guna mendorong pembangunan padat karya.²⁰ Peningkatan investasi swasta dan pertumbuhan sektor formal semenjak tahun 2003 yang lebih cepat dari sektor informal mengindikasikan bahwa prioritas terdapat pada memperbaiki lingkungan kondusif yang lebih luas dan bukan pada fokus sempit untuk memperbaiki Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/2003 yang menurut beberapa pihak terlalu kaku bagi perluasan kerja di sektor formal. Usaha mikro dan kecil merupakan sumber penting bagi penciptaan lapangan kerja, dan tantangan kebijakan adalah untuk memastikan keberlanjutan usaha kecil dan mikro melalui peningkatan akses ke pelatihan serta keuangan dan insentif untuk bergerak ke perekonomian formal, terutama dengan mengefektifkan peraturan dan perizinan.

Lima, pola perdagangan dan bentuk-bentuk lain dari globalisasi tidak hanya mengarah pada transformasi struktural tetapi juga peningkatan perputaran pasar kerja dan biaya penyesuaian. Hal ini juga berdampak pada penurunan keamanan kerja dan penyebaran bentuk-bentuk pekerjaan – termasuk pekerjaan sub-kontrak – yang secara umum tidak menawarkan banyak hak dan keuntungan yang didapatkan oleh pekerja tetap.²¹ Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah membuat kebijakan dan kelembagaan pasar kerja untuk memberikan bantuan penyesuaian bagi pekerja, terutama pekerja berketerampilan rendah.

Pada semua bidang kebijakan di atas, dialog sosial sangatlah penting. Dialog sosial penting untuk mencapai kesepakatan nasional dan rasa kepemilikan pada pembuatan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan. Dialog seperti ini pada gilirannya harus didukung oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan organisasi pengusaha dan pekerja dengan kapasitas teknis yang memadai untuk mewakili pemangku kepentingan mereka dan untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan. Lembaga tenaga kerja dan sistem negosiasi kolektif yang mantap juga akan memastikan hasil yang berkeadilan bagi pertumbuhan produktivitas dan ekonomi dan dalam mengatasi ketidakadilan yang semakin meningkat.

20 Lihat Lampiran II untuk elemen-elemen lingkungan yang kondusif bagi usaha yang berkelanjutan dan ILO: *Report of the Committee on Sustainable Enterprises*, Provisional Record No. 15, Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-96, Jenewa, 2007.

21 Lihat ILO: *Labour and Social Trends in ASEAN 2007*, Bangkok, 2007, Bab 6 untuk pengkajian yang lebih detil mengenai dampak integrasi perekonomian terhadap pasar kerja.

Melihat ke depan ke tahun 2015

Pada Pertemuan Regional Asia ILO Ke-14 pada tahun 2006, perwakilan pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja berkomitmen untuk menjalankan Dasawarsa Pekerjaan Layak Asia (2006-2015). Selama periode ini upaya-upaya bersama dan berkelanjutan akan dilaksanakan untuk mewujudkan pekerjaan yang layak di wilayah Asia Pasifik. Bab ini menggarisbawahi beberapa perubahan yang diproyeksikan terjadi pada struktur demografis dan angkatan kerja, selain juga memberikan contoh-contoh skenario berdasarkan elastisitas ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Bab ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian para pembuat kebijakan, pengusaha dan pekerja selama Dasawarsa Pekerjaan Layak.

2.1 Proyeksi kecenderungan demografis

Indonesia sedang menghadapi perubahan demografis selama Dasawarsa Pekerjaan Layak Asia. Antara tahun 2006 sampai 2015, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 25 juta (atau sekitar 1,1 persen per tahun) menjadi 248 juta (Tabel 2.1). Tingkat pertumbuhan akan jauh lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk 1,3 persen pada periode sebelumnya dan hal ini dicerminkan sebagian oleh angka kesuburan yang lebih rendah akibat keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970an.²²

*Bonus demografis
harus dimanfaatkan*

²² Angka kesuburan, 2,21 pada tahun 2006, menurun secara signifikan dari sekitar angka 5 pada tahun 1970an. Pada tahun 2015, diperkirakan jumlah keseluruhan angka kesuburan akan mencapai 2,1 (Lihat 2.1). Pada dimensi ini, Indonesia diharapkan memiliki angka reproduktif bersih satuan (*unity net reproductive rate*), di mana seorang ibu akan digantikan oleh hanya satu anak perempuan saja.

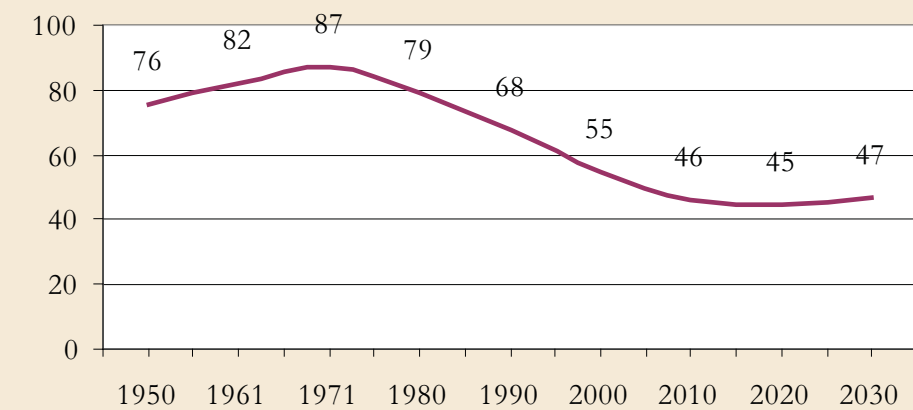
Tabel 2.1
Proyeksi demografis, 2006–2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Populasi										
Laki-laki (juta)	111,21	112,63	114,05	115,46	116,88	118,29	119,70	121,10	122,49	123,84
Perempuan (juta)	110,84	112,28	113,73	115,17	116,60	118,04	119,48	120,91	122,33	123,73
Total (juta)	222,05	224,90	227,78	230,63	233,48	236,33	239,17	242,01	244,81	247,57
Perbandingan jenis kelamin	100,3	100,3	100,3	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,1	100,1
Tingkat pertumbuhan tahunan (%)	1,30	1,29	1,28	1,25	1,23	1,22	1,20	1,19	1,16	1,13
Penduduk berusia 60+ (juta)	16.823,7	17.313,0	17.844,8	18.425,0	19.036,6	19.744,9	20.494,2	21.295,3	22.185,3	23.159,6
Total Angka Kesuburan	2,21	2,19	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11
Angka Reproduksi bersih	1,02	1,01	1,01	1,01	1	1	1	1	0,99	0,99
Harapan hidup pada saat lahir										
Laki-laki	67,5	67,9	68,3	68,6	68,9	69,2	69,6	69,8	70,1	70,3
Perempuan	71,5	71,9	72,2	72,5	72,9	73,2	73,5	73,8	74,1	74,3
Total	69,4	69,8	70,2	70,5	70,8	71,2	71,5	71,8	72	72,3
Angka kematian bayi										
Laki-laki	35,2	33,7	32,2	30,9	29,5	28,3	27,1	26	25	24
Perempuan	26,2	25	23,8	22,7	21,6	20,6	19,7	18,8	18	17,2
Total	30,8	29,4	28,1	26,9	25,7	24,6	23,5	22,5	21,6	20,7

Sumber: Nazara, S.: *Indonesian Labour Market: Toward the Asian Decent Work Decade*, Dokumen latar belakang yang tidak dipublikasikan berdasarkan penugasan dari ILO, 2007.

Penurunan kesuburan merupakan salah satu faktor yang memungkinkan Indonesia untuk menikmati suatu periode penurunan rasio ketergantungan (Lihat Gambar 2.1). Pada awal tahun 1970an, rasio ketergantungan sekitar 87, yang mengindikasikan bahwa 100 orang dalam usia produktif (yaitu berusia antara 15 dan 64 tahun) harus menopang 87 orang yang tidak produktif (di bawah 14 tahun dan lebih tua dari 65 tahun). Rasio ini telah menurun menjadi 50 pada tahun 2005 dan diproyeksikan mencapai titik terendah 45 pada tahun 2017. Setelah tahun 2017, rasio ketergantungan diperkirakan naik kembali.

Gambar 2.1
Rasio ketergantungan, 1950–2030



Sumber: Nazara (2007), op. cit.

Manfaat agregat muncul dari rasio ketergantungan yang menurun seperti ini, karena perekonomian memiliki potensi untuk mengakumulasi simpanan domestik yang lebih besar, hal ini biasa disebut “bonus demografis” atau “dividen demografis”. Fenomena ini akan berakhir pada saat angka ketergantungan mencapai titik terendah. Karenanya, hanya terdapat waktu sepuluh tahun bagi perekonomian untuk menggunakan periode ini dengan sebaik-baiknya. Patut dicatat bahwa dividen ini tidak bisa didapatkan secara otomatis. Hal ini sangat tergantung pada, antara lain, apakah perekonomian dapat memobilisasi modal yang cukup untuk secara produktif mempekerjakan pekerja potensial baru, yang lebih lanjut lagi menggarisbawahi pentingnya tindakan bersama yang terkoordinasi selama Dasawarsa Pekerjaan Layak di Indonesia.

Selain penambahan penduduk usia produktif, jumlah penduduk usia lanjut juga akan bertambah secara signifikan. Diperkirakan pada tahun 2012, jumlah anak di bawah umur lima tahun akan sama banyaknya dengan orang berusia 60 tahun ke atas, dan pada tahun 2016 jumlah orang berusia 60 tahun ke atas akan mencapai 23,2 juta, kurang lebih 38 persen lebih tinggi dibandingkan jumlah pada tahun 2006. Kecenderungan ini memiliki dampak serius bagi sistem jaminan sosial nasional, dan terutama Undang-Undang No. 24/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diharapkan dapat mereformasi sistem yang ada untuk menuju cakupan universal dan menciptakan skema-skema baru seperti pensiun untuk usia lanjut (Kotak 2.1).

Indonesia menua

Kotak 2.1 Tunjangan hari tua di Indonesia

Walaupun terdapat pilihan pensiun untuk pegawai negeri di Indonesia, pilihan seperti ini tidak tersedia bagi pegawai swasta, yang hanya mendapatkan tunjangan pensiun satu kali saja. Skema tunjangan pensiun satu kali ini secara umum tidak memenuhi persyaratan Konvensi Jaminan Sosial ILO (Standar Minimum), 1952 (No. 102) karena tidak memberikan pembayaran secara berkala dan tidak dapat memperkirakan kehilangan pendapatan setelah pensiun.

Mengingat populasi Indonesia yang menua, pertimbangan pengembangan skema pensiun perlu untuk dilakukan. Undang-Undang Sistem Keamanan Sosial Nasional No. 40/2004 sudah memberikan pensiun sebagai program jaminan sosial tetapi rancangan dan pelaksanaan spesifiknya belum ada. Reformasi apapun harus memperkuat Jamsostek, dana asuransi sosial nasional, agar Jamsostek mampu menyediakan skema pensiun, terutama dalam kapasitasnya untuk melakukan pembayaran periodik seumur hidup pensiunan dan bukan sekedar pembayaran satu kali saja.

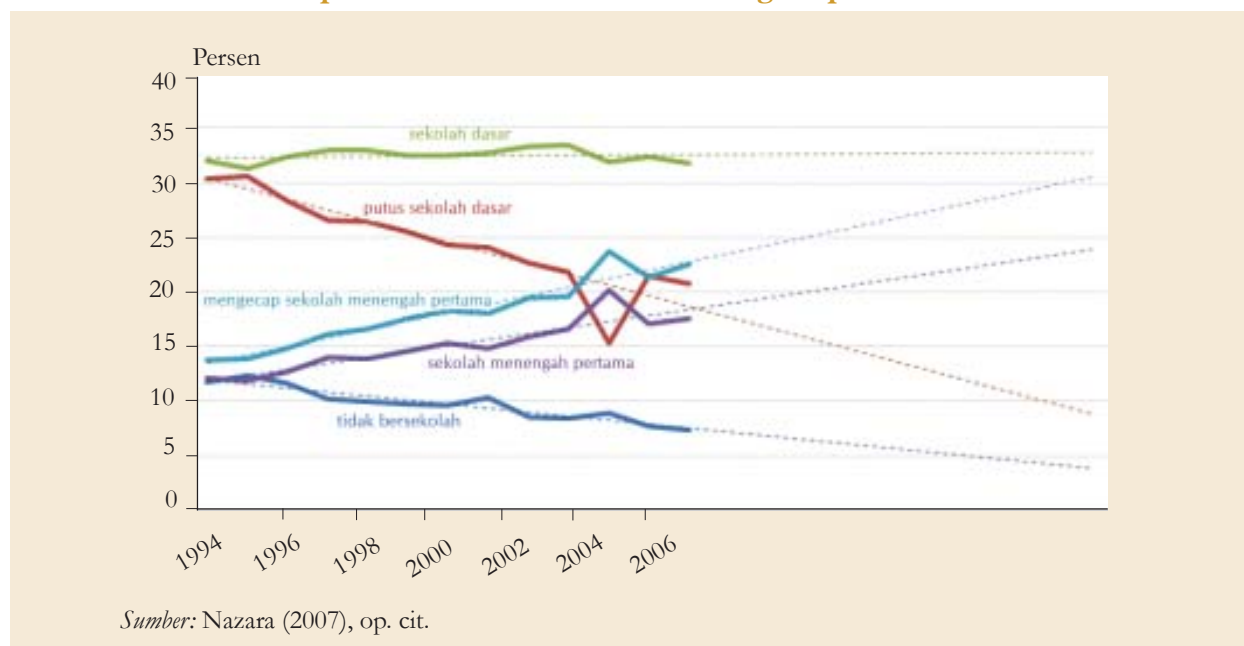
Sumber: ILO: Pelindungan Sosial di Indonesia: Permasalahan dan Pilihan untuk Pembangunan (Jakarta, 2006).

2.2 Proyeksi dan skenario kecenderungan pasar kerja

Angkatan kerja akan lebih terdidik

Angkatan kerja Indonesia, yang terdiri dari 109,9 juta orang pada tahun 2006 diperkirakan akan meningkat menjadi 124,4 juta pada tahun 2015, atau sekitar 14 persen, sehingga akan terus memberikan tekanan bagi pasar kerja. Pendatang baru ke pasar kerja antara tahun 2007 dan 2015 diperkirakan lebih berpendidikan ketimbang sebelumnya. Diproyeksikan bahwa jumlah populasi (berusia sepuluh tahun ke atas) yang hanya berpendidikan SD akan berkurang setengah sehingga hanya akan ada sekitar 10 persen pada tahun 2015 (Gambar 2.2). Di sisi lain, jumlah mereka yang berpendidikan SMU ke atas diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2015. Karena pengangguran yang lebih berpendidikan lebih banyak di Indonesia, pembangunan ekonomi harus menyeimbangkan dengan peningkatan pendidikan dan bahwa perekonomian harus mampu untuk bergerak ke jalur pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga mampu menyerap mereka dengan pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi pula guna mengurangi pengangguran dan memastikan bahwa penduduk dengan pendidikan lebih tinggi memiliki akses atas pekerjaan layak dan produktif.

Gambar 2.2
Populasi usia 10+ berdasarkan tingkat pendidikan



Selain peningkatan pendidikan, terdapat pula keperluan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan dan teknis. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, seperti yang diukur dengan pengetahuan yang didapatkan siswa dalam tes kemampuan kognitif, lebih penting bagi pertumbuhan PDB ketimbang kuantitas pendidikan.²³ Terkait dengan hal ini, terdapat ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada survei Programme for International Student Assessment (PISA) - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Survei ini menilai sejauh mana siswa berusia 15 tahun (yang hampir menyelesaikan pendidikan dasar wajib) telah mendapatkan kompetensi-kompetensi kunci di bidang membaca, ilmu pengetahuan dan matematika. Survei ini dirancang tidak hanya untuk menilai penguasaan siswa terhadap kurikulum sekolah tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dewasa.

Tabel 2.2 memberikan skor rata-rata kinerja siswa pada tes PISA di Indonesia, terhadap rata-rata untuk 28 negara berpendapatan menengah dan rata-rata OECD. Hasilnya memperlihatkan bahwa kinerja siswa Indonesia sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata 28 negara berpendapatan menengah dan OECD di ketiga bidang. Lebih lanjut lagi menurut hasil PISA, 65,7 persen, 61,6 persen, dan 58,3 persen siswa Indonesia tidak memiliki tingkat kemampuan yang memadai di bidang matematika, pengetahuan dan membaca yang dianggap memberikan dasar-dasar penting untuk berpartisipasi secara efektif dan produktif dalam berbagai situasi hidup. Sedangkan rata-rata OECD adalah 21,3 persen, 19,3 persen, dan 20,1 persen dan mengindikasikan bahwa cukup banyak siswa Indonesia tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dewasa dan dalam pasar kerja. Berita baiknya, hasil pembelajaran seperti yang diukur oleh indikator-indikator ini meningkat cukup besar dari hasil survei tahun 2000 dan 2003.

23 Hanushek, E. and Wö2mann: *Education Quality and Economic Growth* (Washington, DC, World Bank, 2007).

Tabel 2.2
Rata-rata skor PISA 2006

	Ilmu Pengetahuan	Matematika	Membaca
Indonesia	393	391	393
28 negara berpendapatan menengah	443	437	425
Rata-rata OECD	500	498	492

Sumber: OECD: PISA 2006, Volume 2: Data (Paris 2007).
 Catatan: 28 negara ekonomi berkembang termasuk Argentina, Azerbaijan, Brasil, Bulgaria, Chile, Kolombia, Kroasia, Estonia, Hongkong (China), Indonesia, Israel, Yordania, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Macao (China), Montenegro, Qatar, Romania, Federasi Rusia, Serbia, Slovenia, Taiwan, Provinsi China, Thailand, Tunisia dan Uruguay

*Pengangguran di
Indonesia
diperkirakan
menurun menjadi 7
persen pada tahun
2009*

Dengan berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen berlanjut, pengangguran di Indonesia diperkirakan menurun menjadi sekitar 7,0 persen pada tahun 2009, tahun di mana Pemerintah telah menargetkan penurunan pengangguran menjadi setengah.²⁴ Tabel 2.3 memberikan berbagai skenario pasar kerja dari tahun 2007 hingga 2015 berdasarkan berbagai elastisitas ketenagakerjaan. Proyeksi ke depan memiliki tingkat kesalahan yang besar dan skenario hanya bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hasil pasar kerja bisa berbeda-beda tergantung pada elastisitas yang berbeda-beda. Sebagai contoh, apabila perekonomian mampu terus bertumbuh sebesar 6 persen per tahun, dan pertumbuhan angkatan kerja terus berkembang dengan laju saat ini 1,8 persen per tahun, dengan elastisitas ketenagakerjaan 0,5 (atau pada kasus Indonesia, tambahan 500.000 pekerja per 1 poin persentase pertumbuhan PDB), angka pengangguran dapat turun menjadi 0,2 persen pada tahun 2015. Di sisi lain, apabila kondisi yang sama bertahan, kecuali hanya ada sekitar 300.000 tambahan pekerja per 1 persen pertumbuhan keluaran, angka pengangguran akan tetap 9,1 persen pada tahun 2015.²⁵ Sehingga elastisitas tenaga kerja 0,5 mengimplikasikan bahwa setengah dari pertumbuhan mengarah pada keuntungan produktivitas dan setengahnya lagi pada keuntungan dari peningkatan pertumbuhan ketenagakerjaan. Skenario ini juga diberikan khususnya untuk menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan ketenagakerjaan untuk hasil pasar kerja yang optimal.

24 Proyeksi ini menggunakan 2007 sebagai tahun dasar, dan juga mengambil asumsi rata-rata pertumbuhan angkatan kerja 1,8% (berdasarkan data 2000-2007) dan elastisitas ketenagakerjaan sekitar 0,5, perkiraan untuk periode 2000-2006 (Lihat Lampiran III untuk detail mengenai elastisitas ketenagakerjaan ini). Lihat juga Kapsos, S. *The employment intensity of growth: trends and macroeconomic determinants*, Makalah Strategi Ketenagakerjaan ILO 2005/12, Jenewa, 2005, untuk pembahasan yang lebih mendalam mengenai elastisitas ketenagakerjaan.

25 Elastisitas 0,5 mengimplikasikan bahwa setiap 1 poin persen pertumbuhan PDB dikaitkan dengan pertumbuhan ketenagakerjaan 0,5 poin persen. Elastisitas ketenagakerjaan 0,5 diterjemahkan menjadi 500.000 pekerja dari 1 poin persen pertumbuhan PDB di Indonesia karena jumlah keseluruhan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2007 mencapai sekitar 100 juta.

Tabel 2.3
Skenario pasar kerja berdasarkan berbagai elastisitas tenaga kerja (juta)

	2007	2010	2015
Skenario 1: Elastisitas ketenagakerjaan 0,5			
Angkatan kerja	109,9	116,0	126,8
Pekerja	99,9	109,3	126,6
Pengangguran	10,0	6,7	0,2
Angka pengangguran (%)	9,1	5,8	0,2
Skenario 2: Elastisitas ketenagakerjaan 0.4			
Angkatan kerja	109,9	116,0	126,8
Pekerja	99,9	107,3	120,8
Pengangguran	10,0	8,7	6,0
Angka pengangguran (%)	9,1	7,5	4,7
Skenario 3: Elastisitas ketenagakerjaan 0.3			
Angkatan kerja	109,9	116,0	126,8
Pekerja	99,9	105,4	115,3
Pengangguran	10,0	10,6	11,5
Angka pengangguran (%)	9,1	9,1	9,1
Catatan: Berdasarkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan pertumbuhan angkatan kerja 1,8 persen. Sumber: Perhitungan penulis, untuk 2007, BPS			

Perubahan teknologi yang cepat, integrasi lebih jauh lagi ke pasar global dan tekanan kompetitif yang dihasilkan diperkirakan akan membuat berlanjutnya pergeseran dari pertanian ke jasa. Selama beberapa tahun ke depan, sebagian besar penduduk Indonesia diperkirakan bekerja di sektor jasa karena jumlah pekerjaan di sektor ini diperkirakan meningkat dari 40 persen pada 2007 menjadi 44 persen pada 2015.²⁶

Sebagian besar penduduk Indonesia akan bekerja di sektor jasa

Kecenderungan peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun ke depan. Fasilitasi dan peningkatan penempatan pekerja migran adalah salah satu tujuan kebijakan pemerintah; mobilitas tenaga kerja merupakan elemen penting Komunitas ASEAN, di mana Indonesia menjadi anggota. Dikombinasikan dengan “faktor penarik” seperti populasi yang menua di negara lain dan perbedaan pendapatan antara Indonesia dan negara lain, jumlah pekerja migran yang resmi diperkirakan akan mencapai lebih dari 10 juta selama Dasawarsa Pekerjaan Layak Asia.²⁷

Jumlah pekerja migran di luar negeri kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan

²⁶ Proyeksi ILO Jakarta.

²⁷ Diperkirakan bahwa terdapat 4,3 pekerja migran resmi Indonesia pada tahun 2007. Proyeksi ini berdasarkan kecenderungan tahun terakhir.

2.3 Kecenderungan sosial dan implikasi masa yang akan datang

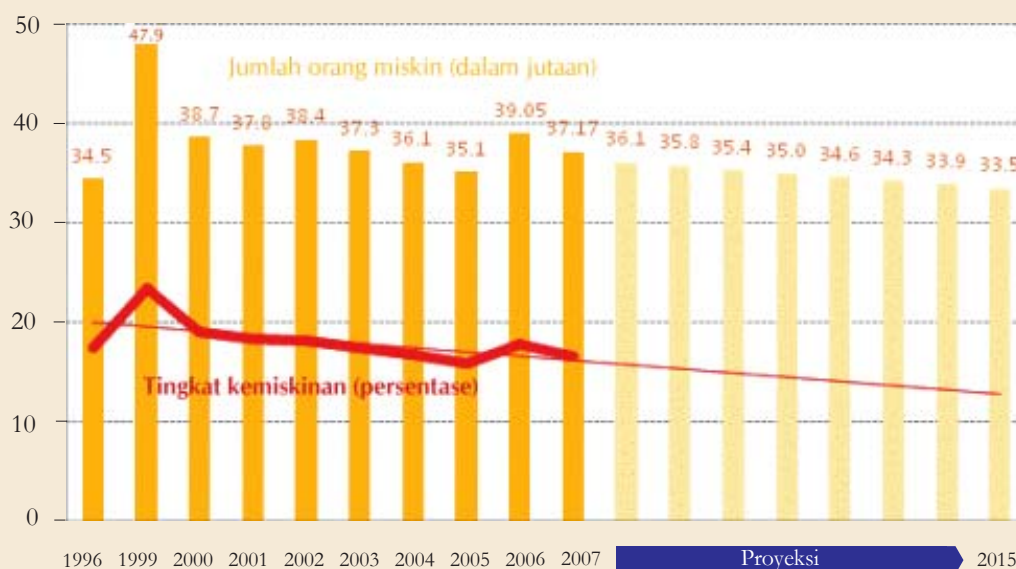
Urbanisasi yang cepat

Pada saat ini Indonesia sedang menjalani migrasi pedesaan – perkotaan yang cepat, yang diharapkan untuk berlanjut. Pada tahun 2000, sekitar 42 persen penduduk tinggal di daerah perkotaan, tetapi rasio ini diharapkan untuk terus meningkat. Pada tahun 2015, diperkirakan sebanyak 60 persen penduduk akan tinggal di daerah perkotaan.²⁸ Karena kegiatan-kegiatan seperti perdagangan kecil dan layanan personal seringkali menjadi sumber pendapatan cepat di daerah perkotaan, migrasi pedesaan – perkotaan tidak hanya berkontribusi pada perluasan sektor jasa, tetapi juga berpotensi untuk memperbesar ukuran perekonomian informal perkotaan. Tantangan yang membayangi selama Dasawarsa Pekerjaan Layak Asia adalah penciptaan pekerjaan layak di daerah perkotaan.

Urbanisasi kemiskinan

Seiring dengan urbanisasi, Indonesia juga menghadapi kecenderungan yang mengarah ke urbanisasi kemiskinan dan pekerja miskin. Pada pertengahan tahun 1970an, kurang dari 20 persen kaum miskin tinggal di daerah perkotaan.²⁹ Namun, pada tahun 2007, sekitar 36 persen kaum miskin tinggal di daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin diperkirakan akan menurun menjadi 33,5 juta pada tahun 2015 (Gambar 2.3) tetapi jumlah pekerja miskin perkotaan diperkirakan akan meningkat.

Gambar 2.3
Kemiskinan di Indonesia: Masa lampau dan proyeksi



Sumber: Nazara (2007), op. cit.

²⁸ Perkiraan oleh Lembaga Demografi, Indonesia.

²⁹ Statistik berdasarkan garis kemiskinan nasional.

Sebagian besar daerah perkotaan di Indonesia tidak akan mampu mengikuti peningkatan kemiskinan ini, karena infrastruktur dasar masih tertinggal dan perawatan yang buruk. Layanan dasar seringkali tidak berfungsi dan tidak mencapai lingkungan-lingkungan termiskin. Selain menderita karena pendapatan yang rendah, kaum miskin perkotaan juga terpapar bahaya kesehatan akibat drainase yang buruk, akumulasi sampah, dan kurangnya fasilitas sanitasi selain bahaya-bahaya lain. Investasi dalam infrastruktur baik di daerah pedesaan – sehingga menghubungkan pasar perkotaan dengan kaum miskin pedesaan – dan di daerah perkotaan yang mampu menghasilkan pekerjaan berkualitas, akan menjadi penting dalam mengatasi tantangan pekerja miskin dan perekonomian informal.

Seperti yang dicatat dalam Melbourne Principles for Sustainable Cities, daerah perkotaan adalah “penting bagi kesempatan ekonomi dan interaksi sosial selain juga pengayaan budaya dan spiritual. Namun, kota-kota juga semakin merusak lingkungan alami, secara tidak berkelanjutan mengeksploitasi sumber daya alam, mengabaikan struktur sosial dan membahayakan kesejahteraan jangka panjang.” Urbanisasi yang cepat di Indonesia, oleh karenanya memiliki bahaya kerusakan lingkungan yang pada gilirannya membutuhkan peralihan ke pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan dan perekonomian yang lebih hijau. Transisi seperti ini akan membawa tantangan dan kesempatan bagi penciptaan pekerjaan. Kesempatan yang diharapkan lebih banyak dari tantangan, terutama di sektor-sektor seperti energi terbarukan, daur ulang, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan gedung-gedung yang efisien secara energi dan infrastruktur yang ramah lingkungan memberikan pertumbuhan bagi pekerjaan hijau (pekerjaan yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan).

Urbanisasi menegaskan perlunya pekerjaan hijau

Kotak 2.2

Inisiatif pekerjaan ramah lingkungan (pekerjaan hijau)

Menyadari bahwa perubahan iklim memiliki dampak besar terhadap perekonomian, dan oleh karenanya terhadap penghidupan dan pekerjaan, United Nations Environment Programme (UNEP), International Trade Union Confederation (ITUC), dan ILO meluncurkan Inisiatif Pekerjaan Hijau pada tahun 2007. Inisiatif ini bertujuan untuk:

- meningkatkan kesadaran dan dialog;
- mengidentifikasi dan menanggapi kesenjangan pengetahuan;
- memfasilitasi “peralihan yang tepat” yang mencerminkan pilar-pilar lingkungan, perekonomian, dan pembangunan sosial berkelanjutan;
- mempromosikan kebijakan dan langkah-langkah untuk mencapai pekerjaan hijau dan tempat kerja hijau;
- mengatalisasi pekerjaan dan pengentasan kemiskinan dalam program perbaikan iklim dan adaptasi; dan
- memperkuat kolaborasi antara ILO/ITUC/UNEP, dalam sistem PBB dan komunitas bisnis internasional.

Sumber: : ILO: *Decent work for sustainable development – The challenge of climate change*, GB.300/WP/SDG/1, Jenewa, 2007 dan UNEP, tersedia di http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs.

Daerah pedesaan juga memerlukan dan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan hijau

Tidak hanya daerah perkotaan yang memerlukan dan mendapatkan keuntungan dari pembangunan berkelanjutan dan pekerjaan hijau, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber-sumber energi, dengan sumber daya angin dan air yang sebagian besar terdapat di daerah pedesaan. Selain itu terdapat pula potensi untuk memperkuat ekoturisme dan pertahanan pesisir, sehingga melahirkan terdapat kesempatan yang signifikan untuk menjadikan peralihan ke perekonomian hijau menjadi kesempatan kerja non-pertanian dan pengurangan kemiskinan. Mengatasi permasalahan-permasalahan perubahan iklim lebih penting bagi penduduk pedesaan karena membawa dampak buruk bagi panen bahan pangan dan mata pencaharian pertanian.

2.4 Tanggapan kebijakan dalam Dasawarsa Pekerjaan Layak Asia

Perkiraan perkembangan tenaga kerja dan sosial selama Dasawarsa Pekerjaan Layak Asia yang diidentifikasi pada bab ini memerlukan tanggapan kebijakan yang terkait dengan hal-hal di bawah ini:

- ♦ Tren demografis, sosial dan ketenagakerjaan menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat dasar-dasar sosial. Pada saat ini Indonesia memiliki beberapa bentuk komponen jaminan sosial dasar: jaminan akses tunjangan kesehatan dasar, jaminan perlindungan pendapatan untuk anak-anak dengan tujuan untuk memfasilitasi akses ke pendidikan dan kesehatan dasar, bantuan sosial bagi kaum miskin dan pengangguran, dan pensiun dasar untuk memberikan perlindungan pendapatan bagi penduduk usia lanjut, cacat dan korban. Tantangannya terletak pada penguatan elemen-elemen ini dan terutama, untuk memperluas perlindungan sosial ke sektor informal, di mana mayoritas penduduk Indonesia bekerja. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial No. 40/2004 merupakan langkah maju yang besar menuju reformasi sistem jaminan sosial nasional di Indonesia dan menuju pencapaian cakupan universal, tetapi tindakan dan komitmen bersama yang terkoordinasi masih diperlukan untuk mengubah kerangka kerja yang ada menjadi rancangan dan pelaksanaan.
- ♦ Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan produktivitas dan ketenagakerjaan. Terutama, meningkatkan produktivitas perekonomian informal. Sehubungan dengan hal ini, peningkatan usaha mikro dan kecil melalui pengembangan keterampilan, termasuk keterampilan manajerial, akuntansi dan pemasaran, akses ke sumber keuangan dan teknologi, dialog sosial serta sistem keselamatan dan kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa usaha-usaha ini menjadi usaha yang berkelanjutan. Dan juga, pendapatan dari pertumbuhan produktivitas perlu disalurkan ke perusahaan untuk penambahan investasi dan inovasi dan juga ke pekerja dalam bentuk upah riil, kondisi kerja yang lebih baik dan pembelajaran di tempat kerja secara terus-menerus.

- ♦ Terdapat banyak ruang untuk meningkatkan hasil pembelajaran di Indonesia. Peningkatan investasi di bidang pendidikan baik kualitas maupun kuantitas penting bagi pertumbuhan produktivitas agregat dan untuk memastikan daya saing Indonesia. Lebih lanjut lagi, mengingat kaum muda Indonesia mengalami ketidakadilan di pasar kerja Indonesia, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan memenuhi kebutuhan pasar kerja dan mengantisipasi perubahan kebutuhan di masa yang akan datang.
- ♦ Peningkatan jumlah pekerja migran yang terjadi dengan cepat juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial, gender dan hak, seperti pindahnya tenaga kerja berkualitas tinggi ke luar negeri (brain drain), ketergantungan dan penganiayaan. Memberikan perlindungan bagi semakin banyaknya pekerja migran di luar negeri merupakan tantangan penting. Kerangka kerja Multilateral ILO untuk Migrasi yang memberikan prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak yang tidak mengikat bagi migrasi tenaga kerja memberikan panduan bagi pemerintah untuk bekerja dengan negara lain dalam memastikan bahwa migrasi saling menguntungkan untuk semua pihak.³¹
- ♦ Peralihan ke perekonomian yang lebih hijau membawa kesempatan dan tantangan bagi pekerjaan layak, dan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Memaksimalkan kesempatan yang ditawarkan oleh pekerjaan hijau dan meminimalkan biaya ketenagakerjaan yang terkait dengan pola konsumsi dan produksi yang lestari/berkelanjutan sepertinya akan menjadi tantangan kebijakan utama. Dialog sosial dan pendekatan tripartit menjadi inti dari solusi dalam mengelola hal ini dan peralihan-peralihan penting lainnya serta dalam menemukan jalur pekerjaan layak menuju pembangunan lapangan kerja yang berbasis tenaga kerja.

31 Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kerangka Kerja Multilateral ILO mengenai Migrasi, lihat <http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/tmmflm-en.pdf>. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran, lihat <http://www.aseansec.org/19264.htm>.

Lampiran I. Disagregasi BPS mengenai Pekerjaan di Perekonomian Formal dan Informal

Status Pekerjaan	Pekerjaan Utama									
	Profesional, Teknis dan pekerja yang terkait	Pekerja administratif dan manajerial	Kerani dan pekerjaan terkait	Penjual	Pekerja jasa	Pekerja industri pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan pemburu	Produksi dan pekerjaan yang terkait	Pekerja transportasi dan operator peralatan	Buruh	Lainnya
Wirausaha	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja yang tidak dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja permanen	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja musiman di bidang pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja musiman bukan di bidang pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja yang tidak dibayar	INF	INF	INF	I NF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Sumber: BPS

Catatan: F menunjukkan formal dan INF menunjukkan informal

Lampiran II. Mempromosikan Usaha-usaha Berkelanjutan

Komite Promosi Usaha-usaha Berkelanjutan Konferensi Perburuhan Internasional 2007 Kesimpulan Selayang Pandang

Persyaratan untuk lingkungan kondusif bagi usaha berkelanjutan	Peran pemerintah dalam promosi usaha berkelanjutan
1. Perdamaian dan stabilitas politik 2. Tata pemerintahan yang baik 3. Dialog sosial 4. Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia universal 5. Budaya kewirausahaan 6. Kebijakan makroekonomi yang mantap dan stabil 7. Perdagangan dan integrasi ekonomi yang berkelanjutan 8. Lingkungan hukum dan peraturan yang mendukung 9. Supremasi hukum dan jaminan hak milik 10. Kompetisi yang adil 11. Akses ke layanan keuangan 12. Infrastruktur fisik 13. Teknologi informasi dan komunikasi 14. Pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup 15. Keadilan sosial dan inklusi sosial 16. Perlindungan sosial yang memadai 17. Perlindungan terhadap lingkungan	1. Memfasilitasi dan berpartisipasi dalam dialog sosial 2. Penegakan hukum ketenagakerjaan melalui administrasi ketenagakerjaan yang efisien termasuk pengawasan ketenagakerjaan 3. Mendorong konsep sukarela tanggung jawab sosial perusahaan 4. Mendorong pengadaan, peminjaman dan investasi publik yang bertanggungjawab sosial dan lingkungan 5. Mempromosikan sektor-sektor dan rantai nilai 6. Fleksibilitas dan perlindungan untuk mengelola perubahan 7. Program-program yang ditargetkan 8. Riset dan inovasi 9. Akses terhadap informasi dan usaha dan layanan keuangan 10. Koordinasi dan koherensi kebijakan 11. Kebijakan internasional 12. Pola produksi dan konsumsi 13. Pengembangan keterampilan pendukung
Prinsip-prinsip tingkat perusahaan bagi usaha yang berkelanjutan	Peran mitra-mitra sosial dalam promosi usaha yang berkelanjutan
1. Dialog sosial dan hubungan industri yang baik 2. Pengembangan sumber daya manusia 3. Kondisi kerja 4. Produktivitas, upah dan keuntungan bersama 5. Tanggung jawab sosial perusahaan 6. Tata kelola perusahaan	1. Advokasi 2. Keterwakilan 3. Layanan 4. Pelaksanaan kebijakan dan standar

Lampiran III. Elastisitas Ketenagakerjaan di Indonesia^a

Elastisitas ketenagakerjaan merujuk kepada persentase perubahan dalam ketenagakerjaan yang dihasilkan dari 1 poin persentase dalam keluaran riil.

Angka elastisitas ketenagakerjaan yang digunakan dalam laporan ini didasarkan pada model di bawah ini:

$$\ln E_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_{it} + \beta_2 \ln RW_{it} + \beta_3 \ln E_{it-1} + e_{it} \quad (1)$$

di mana

E : jumlah pekerjaan (sektoral)

E_{it-1} : keteringgalan pekerjaan

Y : Keluaran (Pendapatan Domestik Regional Bruto propinsi sektoral –PDRB)

RW : Upah produk riil (upah nominal sektoral yang dideflasi dengan deflator PDB riil sektoral)

i dan t merujuk ke propinsi dan tahun.

Elastisitas ketenagakerjaan terkait dengan output diwakili oleh β_1 . Oleh karenanya, ketenagakerjaan (E) akan menghasilkan β_1 persen apabila keluaran (Y) meningkat sebesar 1 persen.

Berdasarkan data BPS untuk tahun 2000–2006, perkiraan elastisitas ketenagakerjaan untuk delapan sub-sektor dan total ekonomi tersedia di tabel berikut ini:

Tabel AIII.1
Elastisitas ketenagakerjaan, 2000–2006 berdasarkan subsektor

Pertanian	0,68
Pertambangan, listrik, gas dan air	0,23
Manufaktur	0,12
Konstruksi	0,63
Perdagangan, hotel dan restoran	0,81
Transportasi dan komunikasi	0,48
Kuangan	0,67
Jasa	0,17
Semua sektor	0,50

^a Sumber: Islam, Y. dan Chowdhury, A: *Enunciating a national employment strategy for Indonesia – what do we know and what should we do?*, Tidak dipublikasikan dan laporan disusun berdasarkan penugasan oleh ILO.

Lampiran IV. Lembaran Statistik

Tabel IV.1.
Indikator Pasar Kerja - 1990, 1995, 2000, 2004-2007

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Populasi ('000s)							
Laki-laki	182.847	197.411	211.693	223.225	226.063	228.865	231.627
Perempuan	91.631	98.881	105.895	111.558	112.952	114.327	115.682
	91.216	98.530	105.798	111.667	113.111	114.538	115.945
Populasi usia kerja (15+)							
Laki-laki	113.540.758	128.801.764	141.170.805	153.948.922	158.491.396	160.811.498	164.118.323
Perempuan	55.699.876	63.283.453	69.837.799	76.639.849	79.738.436	80.441.969	82.079.391
	57.840.882	65.518.311	71.333.006	77.309.073	78.752.960	80.369.529	82.038.932
Non angkatan kerja							
Laki-laki	38.189.135	44.575.774	43.366.311	49.975.535	52.633.743	54.422.563	54.176.964
Perempuan	9.583.392	9.781.213	10.104.712	10.712.685	12.006.917	12.692.078	13.359.504
	28.605.743	34.794.561	33.261.599	39.262.850	40.626.826	41.730.485	40.817.460
Angkatan kerja							
Laki-laki	75.351.623	84.225.990	97.804.494	103.973.387	105.857.653	106.388.935	109.941.359
Perempuan	46.116.484	53.502.240	59.733.087	65.927.164	67.731.519	67.749.891	68.719.887
	29.235.139	30.723.750	38.071.407	38.046.223	38.126.134	38.639.044	41.221.472
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)							
Laki-laki	66,4	65,4	69,3	67,5	66,8	66,2	67,0
Perempuan	82,8	84,5	85,5	86,0	84,9	84,2	83,7
	50,5	46,9	53,4	49,2	48,4	48,1	50,2

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Ketenagakerjaan							
Laki-laki	73.437.376	78.318.036	89.837.730	93.722.036	93.958.387	95.456.935	99.930.217
Perempuan	44.984.297	50.602.267	55.439.063	60.581.511	61.439.086	61.977.289	63.147.938
	28.453.079	27.715.769	34.398.667	33.140.525	32.519.301	33.479.646	36.782.279
Rasio tenaga kerja-penduduk (persen)							
Laki-laki	64,7	60,8	63,6	60,9	59,3	59,4	60,9
Perempuan	80,8	80,0	79,4	79,0	77,1	77,0	76,9
	49,2	42,3	48,2	42,9	41,3	41,7	44,8
Pengangguran							
Laki-laki	1.914.247	5.907.954	7.966.764	10.251.351	11.899.266	10.932.000	10.011.142
Perempuan	1.132.187	2.899.973	4.294.024	5.345.653	6.292.433	5.772.602	5.571.949
	782.060	3.007.981	3.672.740	4.905.698	5.606.833	5.159.398	4.439.193
Tingkat pengangguran (persen)							
Laki-laki	2,5	7,0	8,1	9,9	11,2	10,3	9,1
Perempuan	2,5	5,4	7,2	8,1	9,3	8,5	8,1
	2,7	9,8	9,6	12,9	14,7	13,4	10,8
<i>Sumber:</i> Population: UN, World Population Prospects 2006 Revision Database; Untuk indikator lainnya: BPS.							

Tabel IV.2.
Indikator Pasar Kerja Muda -1990, 1995, 2000, 2004-2007

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Populasi usia kerja (15-24)	34.083.155	37.429.551	38.268.568	39.260.775	42.282.753	42.152.876	43.061.390
Laki-laki	16.775.258	18.309.565	18.806.152	19.579.338	21.094.391	21.500.254	21.960.724
Perempuan	17.307.897	19.119.986	19.462.416	19.681.437	21.188.362	20.652.622	21.100.666
Di luar angkatan kerja (15-24)	16.705.890	17.279.702	17.297.885	18.024.335	19.969.234	19.872.306	20.548.852
Laki-laki	6.539.097	6.311.542	6.802.610	7.009.188	7.982.447	8.233.472	8.164.244
Perempuan	10.166.793	10.968.160	10.495.275	11.015.147	11.986.787	11.638.834	12.384.608
Angkatan kerja (15-24)	17.377.265	20.149.849	20.970.683	21.236.440	22.313.519	22.280.570	22.512.538
Laki-laki	10.236.161	11.998.023	12.003.542	12.570.150	13.111.944	13.266.782	13.796.480
Perempuan	7.141.104	8.151.826	8.967.141	8.666.290	9.201.575	9.013.788	8.716.058
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	51,0	53,8	54,8	54,1	52,8	52,9	52,3
Laki-laki	61,0	65,5	63,8	64,2	62,2	61,7	62,8
Perempuan	41,3	42,6	46,1	44,0	43,4	43,6	41,3
Bekerja (15-24)	15.995.104	16.120.343	15.886.404	14.959.395	14.853.883	15.464.354	16.852.502
Laki-laki	9.437.955	9.995.182	9.186.013	9.192.238	9.166.087	9.578.277	10.518.143
Perempuan	6.557.149	6.125.161	6.700.391	5.767.157	5.687.796	5.886.077	6.334.359

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Rasio tenaga kerja-penduduk (persen)							
Laki-laki	46,9	43,1	41,5	38,1	35,1	36,7	39,1
Perempuan	56,3	54,6	48,8	46,9	43,5	44,5	47,9
	37,9	32,0	34,4	29,3	26,8	28,5	30,0
Pengangguran (15-24)							
Laki-laki	1.382.161	4.029.506	5.084.279	6.277.045	7.459.636	6.816.216	5.660.036
Perempuan	798.206	2.002.841	2.817.529	3.377.912	3.945.857	3.688.505	3.278.337
	583.955	2.026.665	2.266.750	2.899.133	3.513.779	3.127.711	2.381.699
Tingkat pengangguran (15-24, persen)							
Laki-laki	8,0	20,0	24,2	29,6	33,4	30,6	25,1
Perempuan	7,8	16,7	23,5	26,9	30,1	27,8	23,8
	8,2	24,9	25,3	33,5	38,2	34,7	27,3
Sumber: BPS							

Tabel IV.3.
Indikator Pasar Kerja Muda -1990, 1995, 2000, 2004-2007

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Total							
Wirasaha	14.810.823	19.892.221	19.501.330	18.309.288	17.296.006	19.504.632	20.324.527
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja yang tidak dibayar	17.884.242	15.473.358	20.720.366	21.512.405	20.987.165	19.946.732	21.024.297
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja permanen	584.992	1.250.124	2.032.527	2.965.893	2.849.076	2.850.448	2.883.832
Pekerja	20.832.755	28.215.271	29.498.039	25.459.554	26.027.953	26.821.889	28.042.390
Pekerja musiman di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4.449.921	5.534.842	5.541.158	5.917.315
Pekerja musiman bukan di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	3.732.838	4.325.365	4.618.280	4.458.857
Pekerja yang tidak dibayar	19.323.358	13.487.062	18.085.468	17.292.137	16.937.980	16.173.796	17.278.999
Total	73.436.170	78.318.036	89.837.730	93.722.036	93.958.387	95.456.935	99.930.217
Laki-laki							
Wirasaha	9.965.441	13.537.146	13.222.375	12.844.876	12.358.294	13.551.397	13.557.406
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja yang tidak dibayar	14.127.834	11.670.075	16.128.013	16.896.284	16.897.505	15.669.243	15.890.034
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja permanen	489.313	1.057.996	1.608.168	2.602.297	2.460.974	2.466.231	2.374.922
Pekerja	14.343.900	19.992.511	19.788.206	17.629.206	17.706.648	17.934.753	18.911.566
Pekerja musiman di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	2.841.687	3.642.291	3.724.423	3.767.045
Pekerja musiman bukan di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	3.228.822	3.635.460	3.868.884	3.713.920
Pekerja yang tidak dibayar	6.057.151	4.344.539	4.692.301	4.538.339	4.737.914	4.762.358	4.933.045
Total	44.983.639	50.602.267	55.439.063	60.581.511	61.439.086	61.977.289	63.147.938
Perempuan							
Wirasaha	4.845.382	6.355.075	6.278.955	5.464.412	4.937.712	5.953.235	6.767.121
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja yang tidak dibayar	3.756.408	3.803.283	4.592.353	4.616.121	4.089.660	4.277.489	5.134.263
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja permanen	95.679	192.128	424.359	363.596	388.102	384.217	508.910
Pekerja	6.488.855	8.222.760	9.709.833	7.830.348	8.321.305	8.887.136	9.130.824

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Pekerja musiman di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	1.608.234	1.892.551	1.816.735	2.150.270
Pekerja musiman bukan di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	504.016	689.905	749.396	744.937
Pekerja yang tidak dibayar	13.266.207	9.142.523	13.393.167	12.753.798	12.200.066	11.411.438	12.345.954
Total	28.452.531	27.715.769	34.398.667	33.140.525	32.519.301	33.479.646	36.782.279
Persentase							
Total							
Wirasaha	20,2	25,4	21,7	19,5	18,4	20,4	20,3
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja yang tidak dibayar	24,4	19,8	23,1	23,0	22,3	20,9	21,0
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja permanen	0,8	1,6	2,3	3,2	3,0	3,0	2,9
Pekerja	28,4	36,0	32,8	27,2	27,7	28,1	28,1
Pekerja musiman di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4,7	5,9	5,8	5,9
Pekerja musiman bukan di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4,0	4,6	4,8	4,5
Pekerja yang tidak dibayar	26,3	17,2	20,1	18,5	18,0	16,9	17,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Laki-laki							
Wirasaha							
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja yang tidak dibayar	22,2	26,8	23,9	21,2	20,1	21,9	21,5
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja permanen	31,4	23,1	29,1	27,9	27,5	25,3	25,2
Pekerja	1,1	2,1	2,9	4,3	4,0	4,0	3,8
Pekerja musiman di bidang pertanian	31,9	39,5	35,7	29,1	28,8	28,9	29,9
Pekerja musiman bukan di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4,7	5,9	6,0	6,0
Pekerja yang tidak dibayar	n.a.	n.a.	n.a.	5,3	5,9	6,2	5,9
Total	13,5	8,6	8,5	7,5	7,7	7,7	7,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel IV.3.
Indikator Pasar Kerja Muda -1990, 1995, 2000, 2004-2007

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Perempuan							
Wirasaha	17,0	22,9	18,3	16,5	15,2	17,8	18,4
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/ pekerja yang tidak dibayar	13,2	13,7	13,4	13,9	12,6	12,8	14,0
Pengusaha yang dibantu oleh pekerja permanen	0,3	0,7	1,2	1,1	1,2	1,1	1,4
Pekerja							
Pekerja musiman di bidang pertanian	22,8	29,7	28,2	23,6	25,6	26,5	24,8
Pekerja musiman bukan di bidang pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4,9	5,8	5,4	5,8
Pekerja yang tidak dibayar	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2,1	2,2	2,0
Total	46,6	33,0	38,9	38,5	37,5	34,1	33,6
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Sumber: BPS</i>							

Tabel IV. 4
Pekerjaan berdasarkan Sektor - 1990, 1995, 2000, 2004-2007

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Total							
Pertanian	40.559.333	34.009.912	40.680.229	40.608.019	41.309.776	40.136.242	41.206.474
Pertambangan	512.270	633.224	451.931	1.034.716	904.194	923.591	994.614
Manufaktur	7.468.270	9.901.478	11.641.756	11.070.498	11.952.985	11.890.170	12.368.729
Listrik, gas & air	134.716	215.694	70.629	228.297	194.642	228.018	174.884
Konstruksi	2.046.415	3.746.553	3.497.232	4.540.102	4.565.454	4.697.354	5.252.581
Perdagangan, restoran & hotel	10.837.931	13.684.652	18.489.005	19.119.156	17.909.147	19.215.660	20.554.650
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	2.302.014	3.447.218	4.553.855	5.480.527	5.652.841	5.663.956	5.958.811
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	477.765	658.497	882.600	1.125.056	1.141.852	1.346.044	1.399.490
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	9.098.662	12.020.808	9.570.493	10.515.665	10.327.496	11.355.900	12.019.984
Total	73.437.376	78.318.036	89.837.730	93.722.036	93.958.387	95.456.935	99.930.217
Laki-laki							
Pertanian	24.637.241	21.931.497	24.603.835	25.819.512	26.891.514	26.369.336	25.983.403
Pertambangan	429.922	532.821	370.253	869.021	765.326	817.716	874.271
Manufaktur	4.124.470	5.713.677	6.722.850	6.660.143	7.033.757	7.005.482	7.119.262
Listrik, gas & air	123.870	188.928	65.020	207.955	179.174	202.721	153.669
Konstruksi	1.987.777	3.646.520	3.356.604	4.428.668	4.465.861	4.574.450	5.119.560
Perdagangan, restoran & hotel	5.190.377	6.973.033	9.684.593	10.230.959	9.711.815	10.330.764	10.372.192
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	2.249.749	3.373.662	4.364.293	5.285.517	5.480.334	5.373.961	5.586.530
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	353.089	475.122	627.229	843.378	835.396	953.079	995.458
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	5.887.802	7.767.007	5.644.386	6.236.358	6.075.909	6.349.780	6.943.593
Total	44.984.297	50.602.267	55.439.063	60.581.511	61.439.086	61.977.289	63.147.938

Tabel IV. 4
Pekerjaan berdasarkan Sektor - 1990, 1995, 2000, 2004-2007

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Perempuan							
Pertanian	15.922.092	12078415	16.076.394	14788507	14418262	13766906	15223071
Pertambangan	82.348	100403	81.678	165695	138868	105875	120343
Manufaktur	3.343.800	4187801	4.918.906	4410355	4919228	4884688	5249467
Listrik, gas & air	10.846	26766	5.609	20342	15468	25297	21215
Konstruksi	58.638	100033	140.628	111434	99593	122904	133021
Perdagangan, restoran & hotel	5.647.554	6711619	8.804.412	8888197	8197332	8884896	10182458
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	52.265	73556	189.562	195.010	172507	289995	372281
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	124.676	183375	255371	281678	306456	392965	404032
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	3210860	4.253.801	3926107	4.279.307	4251587	5006120	5076391
Total	28.453.079	27715769	34.398.667	33140525	32.519.301	33479646	36.782.279
Persentase							
Total							
Pertanian	55,2	43,4	45,3	43,3	44,0	42,0	41,2
Pertambangan	0,7	0,8	0,5	1,1	1,0	1,0	1,0
Manufaktur	10,2	12,6	13,0	11,8	12,7	12,5	12,4
Listrik, gas & air	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Konstruksi	2,8	4,8	3,9	4,8	4,9	4,9	5,3
Perdagangan, restoran & hotel	14,8	17,5	20,6	20,4	19,1	20,1	20,6
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	3,1	4,4	5,1	5,8	6,0	5,9	6,0
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0,7	0,8	1,0	1,2	1,2	1,4	1,4
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	12,4	15,3	10,7	11,2	11,0	11,9	12,0
Total	100	100	100	100	100	100	100

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
Laki-laki							
Pertanian	54,8	43,3	44,4	42,6	43,8	42,5	41,1
Pertambangan & galian	1,0	1,1	0,7	1,4	1,2	1,3	1,4
Manufaktur	9,2	11,3	12,1	11,0	11,4	11,3	11,3
Listrik, gas & air	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2
Konstruksi	4,4	7,2	6,1	7,3	7,3	7,4	8,1
Perdagangan, restoran & hotel	11,5	13,8	17,5	16,9	15,8	16,7	16,4
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	5,0	6,7	7,9	8,7	8,9	8,7	8,8
Kepangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0,8	0,9	1,1	1,4	1,4	1,5	1,6
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	13,1	15,3	10,2	10,3	9,9	10,2	11,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Perempuan							
Pertanian	56,0	43,6	46,7	44,6	44,3	41,1	41,4
Pertambangan	0,3	0,4	0,2	0,5	0,4	0,3	0,3
Manufaktur	11,8	15,1	14,3	13,3	15,1	14,6	14,3
Listrik, gas & air	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Konstruksi	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Perdagangan, restoran & hotel	19,8	24,2	25,6	26,8	25,2	26,5	27,7
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	0,2	0,3	0,6	0,6	0,5	0,9	1,0
Kepangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0,4	0,7	0,7	0,8	0,9	1,2	1,1
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	11,3	15,3	11,4	12,9	13,1	15,0	13,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Sumber: BPS</i>							

Tabel IV.
Indikator-indikator Latar Belakang

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Produk Domestik Bruto (tingkat pertumbuhan tahunan) 4,9 <i>Sumber:</i> ADB, Asia Economic Monitor 2007.		3,6	4,5	4,8	5,0	5,7	5,5	6,3
Produk Domestik Bruto per kapita (constant 2000 US\$) <i>Sumber:</i> Bank Dunia, Indikator Pembangunan Dunia, 2007.	800	818	844	872	904	942	983	1.065
Produk Domestik Bruto, purchasing power parity (PPP) (constant 2005 US\$) <i>Sumber:</i> Bank Dunia, Indikator Pembangunan Dunia, 2007.	2.724	2.787	2.873	2.971	3.078	3.209	3.348	3.627
Jumlah kaum miskin (jutaan)	38.7	37.9	38.4	37.3	36.1	35.1	39,3	37,2
Persentase kaum miskin	19.4	18,4	18.2	17,4	16,7	16,0	17,8	16,6
<i>Sumber:</i> BPS								